



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 56 Maret 2026

Seputar Kita

Susilo Bambang Yudhoyono yakini Masa Depan Indonesia Berada di Tangan Peserta Pendidikan Lemhannas RI

Profil Pejabat

Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan, S.T., M.Hum., M.Han.: "...orang tua selalu menanamkan integritas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab..."

Opini

Kedaulatan di Balik Meja Makan: Belajar dari Rapuhnya Venezuela



Versi Digital

LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

Sinergi Kampus dan Lemhannas RI
Membangun Generasi Muda



TERIMA KASIH & SELAMAT MENGEMBAN TUGAS BARU

LAKSAMANA MADYA TNI
EDWIN, S.H., M.Han., M.H.

WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN LAUT RI





PELINDUNG ACE HASAN SYADZILY

PENGARAH R. Z. PANCA PUTRA S.

PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI

MUHAMMAD ARIF NUR

REDAKTUR HENDRA SETIAWAN

PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,

CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA

SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA

SAHLA ADIWIDYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,

NAOMI AUGUSTINA, SUCITRA PUTERI RACHMAN

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI

JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah Swantara Edisi 56, Maret 2026, telah terbit di tengah-tengah kita. Tim Redaksi Majalah Swantara terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan melalui beragam rubrik. Diharapkan sajian informasi dalam Majalah Swantara dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Untuk rubrik Laporan Utama pada edisi kali ini membahas Lemhannas Goes to Campus yang diluncurkan sebagai upaya mendekatkan nilai-nilai kebangsaan kepada kalangan mahasiswa dan pemuda.

Pada rubrik Seputar Kita, redaksi menyajikan informasi terkait ide, gagasan, dan kegiatan yang dilaksanakan Lemhannas RI. Sementara itu, rubrik Profil Pejabat mengangkat sosok pejabat Lemhannas RI yang baru dilantik serta Profil Pegawai yang berisi personel berprestasi, sehingga pembaca dapat mengenal lebih dekat dan menjadikannya inspirasi. Selain itu, tim redaksi juga menghadirkan rubrik lain seperti Opini, Hot News, dan Ragam, yang dapat menjadi referensi tambahan dalam memperkaya pengetahuan pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, redaksi sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi keberlangsungan serta peningkatan kualitas k pada edisi-edisi berikutnya.

Terakhir, tim redaksi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam terbitnya Majalah Swantara Edisi 56, Desember 2026. Semoga Majalah Swantara dapat memberikan banyak manfaat dan berkesan di hati para pembaca. *Verba valent, scripta manent.*

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namu Buddhaya

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA *Lemhannas Goes to Campus:* Sinergi Kampus dan Lemhannas RI Membangun Generasi Muda

SEPUTAR KITA



10 P4N Angkatan LXIX Resmi Dibuka, Gubernur Lemhannas RI Tekankan Lima Karakter Kepemimpinan Nasional

12 Hadiri RDP DPR RI, Lemhannas RI Terus Berkomitmen Jalankan Tugas Guna Mendukung Visi Indonesia Emas 2045



14 Lemhannas RI Gandeng Sejumlah Mitra Strategis Perkuat Ketahanan Nasional

15 Gubernur Lemhannas RI: Kepastian Hukum dan Stabilitas Ekonomi Menjadi Pilar Penting Ketahanan Nasional



16 Ketua Mahkamah Konstitusi Sampaikan Peran MK dalam Pembangunan Nasional dan Penguatan Asta Cita

17 Gubernur Lemhannas RI: Pemahaman Geopolitik adalah Bentuk Nasionalisme Masa Kini

SEPUTAR KITA



- 20 Prof. Jimly Asshiddiqie Paparkan Sejarah dan Tantangan UUD NRI 1945 Menuju Indonesia Emas 2045
- 22 Kepala Perpunas RI Tekankan Pentingnya Penguatan Literasi Nasional
- 24 Susilo Bambang Yudhoyono Yakini Masa Depan Indonesia Berada Di Tangan Peserta Pendidikan Lemhannas RI



- 26 Kepala BSSN RI: Menjaga Keamanan Siber Pekerjaan Kolaboratif Berbagai Pemangku Kepentingan
- 28 Wamenlu Soroti Dampak Dinamika Global terhadap Ketahanan Nasional dalam Diskusi P3N Lemhannas RI
- 30 Wamentan RI Tekankan Kepemimpinan Berkarakter untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan

OPINI



- 32 Diplomasi Jalur Pendidikan: Membangun 'Strategic Trust' Kawasan Melalui Alumni Terbaik Lemhannas
- 34 *Lemhannas Goes To Campus*: Menjaga Wawasan Nusantara di Tengah Krisis Kesadaran Kebangsaan
- 38 Kedaulatan di Balik Meja Makan: Belajar dari Rapuhnya Venezuela

PROFIL PEJABAT

- 40 **Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan, S.T., M.Hum., M.Han.:** "...orang tua selalu menanamkan integritas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab..."



PROFIL PEGAWAI

- 44 **Ikcha Maulidya** : "Belajar, Bertumbuh, dan Mengabdikan"



HOT NEWS



- 46 Teknologi Harus Memanusiakan, Bukan Mengorbankan Masa Kecil Anak
- 47 Indonesia Perkuat Kerja Sama Biomassa dengan Jepang di International Biomass Expo 2026 Tokyo

RAGAM



- 48 Keajaiban Papua: Satwa Purba yang Lama Hilang Akhirnya Ditemukan
- 49 Bukan Sekadar Legenda, Burung Beracun Papua Terungkap

SUARA PESERTA



- 50 Kemas Ilham Akbar: Dari Dunia Politik ke Ruang Strategis di Lemhannas RI
- 51 Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M.: "Sinergi Metode Pembelajaran P4N Mengasah Ketajaman Analisis Peserta"



52 GALLERY

● LAPORAN UTAMA

Indonesia tengah memasuki fase transformasi penting dalam perjalanannya menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang terus bertumbuh, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan masyarakat yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Salah satu elemen krusial untuk mencapai cita-cita tersebut adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama generasi muda yang sedang mengenyam pendidikan tinggi. Seiring dengan puncak bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada dekade mendatang, generasi muda, khususnya mahasiswa, memegang peran strategis dalam membangun bangsa yang kompetitif, inovatif, serta tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan.

Pendidikan tinggi di Indonesia memikul peran penting dalam membentuk karakter serta memperluas wawasan kebangsaan mahasiswa. Perguruan tinggi tidak sekadar menjadi ruang untuk memperoleh ilmu dan keterampilan, melainkan juga wahana pembinaan karakter, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta penanaman semangat persatuan dan kesatuan. Karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang wawasan kebangsaan menjadi aspek yang sangat penting dalam menyiapkan calon pemimpin masa depan yang mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Namun demikian, di tengah arus globalisasi, disrupsi digital, dan beragam pengaruh ideologi transnasional, muncul kekhawatiran terkait mudarnya wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa. Gejala seperti meningkatnya sikap individualistis, masifnya penyebaran hoaks melalui media sosial, serta minimnya partisipasi mahasiswa dalam isu-isu kebangsaan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperkuat ketahanan nasional.

Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, Lemhannas RI

menginisiasi kegiatan Lemhannas Goes to Campus yang menjadi bagian dari program 100 Hari Kerja Lemhannas RI. Program ini dirumuskan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut terhadap agenda pemerintahan Kabinet Merah Putih serta implementasi program Asta Cita. Pelaksanaannya sekaligus mencerminkan capaian kinerja Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., sejak awal masa jabatannya.

Program Lemhannas Goes to Campus diluncurkan sebagai upaya mendekatkan nilai-nilai kebangsaan kepada kalangan mahasiswa dan pemuda. Generasi muda, sebagai penerus bangsa, dipandang perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan kebanggaan terhadap identitas nasionalnya.

Dalam Program Lemhannas Goes to Campus, diselenggarakan dialog kebangsaan, seminar, serta diskusi interaktif di berbagai perguruan tinggi guna memperluas pemahaman mahasiswa mengenai Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi tantangan zaman modern. Melalui pertemuan langsung dengan para ahli dan praktisi Lemhannas, mahasiswa didorong untuk menyadari arti penting ketahanan nasional serta peran aktif mereka dalam menjaganya.

Selain itu, Lemhannas Goes to Campus diharapkan menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta peran strategis mahasiswa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui sinergi antara Lemhannas RI, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan, program ini dirancang agar generasi muda semakin siap menghadapi dinamika tantangan ideologi, sosial, dan politik di masa mendatang. Kegiatan ini juga ditujukan sebagai media edukatif dan inspiratif yang mendorong mahasiswa memperkuat identitas kebangsaan, menumbuhkan semangat persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap masa depan

bangsa, sekaligus menyadari pentingnya ketahanan nasional dan kontribusi aktif mereka dalam menjaganya.

Melalui inisiatif ini, Lemhannas tidak hanya menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga berupaya menciptakan multiplier effect yang lebih luas melalui para agen perubahan di lingkungan kampus dan komunitas. "Saya berharap bahwa melalui program ToT dan Lemhannas Goes to Campus, generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga serta memperkuat karakter kebangsaan sebagai fondasi utama ketahanan nasional di masa depan," Gubernur Lemhannas RI Dr.H. T.B. Ace Hasan Syadzily, M.Si. dalam Pernyataan Pers usai pelantikan Oktober 2024 lalu.

Lemhannas Goes to Campus 2025

Di tahun 2025, Program Lemhannas Goes to Campus hadir membawa semangat baru di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada Bulan September 2025 melalui diskusi bertema "Kampus sebagai Wadah Membentuk Karakter Kebangsaan: Meretas Jalan Masa Depan menuju Indonesia Emas 2045". Lemhannas Goes to Campus yang dihadiri oleh civitas akademika dan para mahasiswa Untirta bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta mendorong peran generasi muda sebagai bonus demografi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam ceramahnya, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat mencetak para ilmuwan, tetapi juga harus menjadi kawah candradimuka dalam proses pembentukan kepemimpinan nasional. Sebagai warga negara, seseorang tidak hanya dituntut untuk patuh kepada negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia menekankan bahwa generasi

LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

Sinergi Kampus dan Lemhannas RI
Membangun Generasi Muda





Antusiasme Peserta Lemhannas Goes To Campus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur

muda saat ini berada pada fase kehidupan yang sarat dengan tanggung jawab besar. Berbagai perubahan fase bangsa dimulai oleh generasi muda yang berani menunjukkan karakternya, seperti Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, hingga Reformasi 1998.

“Bangsa ini lahir karena keberanian anak-anak muda, karena anak-anak muda yang mampu menunjukkan karakternya. Budi Utomo lahir karena anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan dan tidak mau bangsanya ditindas oleh bangsa lain,” tegasnya.

Kondisi geopolitik Indonesia di tengah kemajuan teknologi menuntut masyarakat Indonesia untuk memperkuat nasionalismenya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perguruan tinggi berperan sebagai penggerak literasi geopolitik. Hal tersebut dikarenakan program pendidikan mampu memperluas wawasan global individu tanpa menghilangkan identitas nasional.

Oleh karena itu, Gubernur Lemhannas RI terus mendorong agar kampus-kampus di Indonesia dapat mencetak manusia-manusia yang tidak hanya unggul

dalam bidang akademik, tetapi memiliki wawasan kebangsaan. “Perguruan tinggi menjadi bagian dalam membentuk karakter, watak, kepribadian, dan jiwa nasionalisme generasi muda guna mempersiapkan SDM unggul menyongsong Indonesia emas 2045,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.

Lemhannas Goes to Campus juga diselenggarakan di Universitas Brawijaya (UB), Malang pada November 2025 lalu. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Samantha Krida tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa UB dan mengangkat tema “Kampus sebagai Wadah Membentuk Kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily

menekankan pentingnya peran kampus sebagai ruang pembentukan karakter bangsa. Peran perguruan tinggi harus menjadi rumah bagi pembinaan generasi muda yang berlandaskan pada empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mencetak calon pemimpin nasional di masa depan.

“Jadikan Universitas Brawijaya sebagai rumah pembentuk karakter bangsa yang berlandaskan empat konsensus kebangsaan untuk melahirkan pemimpin nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Ace Hasan Syadzily.

Lemhannas RI juga terus menanamkan pemahaman mengenai dinamika kondisi dan situasi geopolitik global yang terus berkembang dan penuh ketidakpastian. Dengan wawasan geopolitik yang luas, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang kompeten serta memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Hal tersebut diyakini dapat mendukung optimalisasi bonus demografi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Anak muda merupakan penerus keberlanjutan bangsa, sehingga semangat kebangsaan harus terus ditanamkan,” kata Gubernur Lemhannas RI.

Antusiasme mahasiswa Universitas Brawijaya terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Ratusan peserta



Sesi Panel Lemhannas Goes To Campus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur

yang hadir menunjukkan komitmen untuk turut berperan aktif dalam membangun masa depan bangsa.

Selain melaksanakan Program Lemhannas Goes to Campus ke Untirta dan UB yang diikuti oleh 1491 Peserta dengan APBN, di tahun 2025, Lemhannas RI juga mengadakan Program Lemhannas Goes to Campus berkolaborasi dengan 9 Perguruan Tinggi di beberapa kota di Indonesia yang menyasar hingga 7826 peserta yang berasal dari pelajar dan mahasiswa.

Lemhannas Goes to Campus 2026

Mengawali tahun 2026, Program Lemhannas Goes to Campus mendapatkan respon positif dari Komisi I DPR RI. salah satu Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang mendorong program Lemhannas Goes to Campus diperluas ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, termasuk Kalimantan, NTT, dan Papua, agar anak muda di luar Pulau Jawa juga mendapatkan pembelajaran kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

"Apalagi saya di Kalimantan, masih banyak yang belum dapat sinyalnya. Sehingga pada saat ini Lemhannas Goes to Campus menjadi satu kebanggaan untuk orang-orang daerah, atau misalnya anak muda daerah untuk bisa mendapatkan pembelajaran Goes to Campus," ujar Andina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Lemhannas RI dan Bakamla, Senin (19/1).

Andina juga menyampaikan bahwa target peserta program Lemhannas Goes to Campus dinilai tepat karena di masa depan, generasi milenial dan Gen Z akan mendominasi 60 persen penduduk Indonesia sebagai kelompok usia produktif. Melalui program ini, generasi muda di seluruh Indonesia diharapkan dapat lebih memahami peran mereka dalam menjaga kedaulatan negara, menghadapi tantangan digital, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial dan politik nasional.

Menanggapi usulan DPR RI, Lemhannas RI mengawali tahun 2026 dengan



Gubernur Lemhannas RI memberikan Materi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Ketahanan Nasional pada Lemhannas Goes To Campus Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN), Kota Binjai, Sumatera Utara

mengadakan program Lemhannas Goes to Campus yang berkolaborasi dengan Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN), kota Binjai, Sumatera Utara pada 30 Januari 2026 lalu. Mengangkat tema "Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Ketahanan Nasional: Membangun Kedaulatan Hukum dan Kemandirian Ekonomi Indonesia", Program Lemhannas Goes to Campus ini menjadi kesempatan emas bagi Mahasiswa INSAN untuk memahami peran mereka dalam menjaga kedaulatan negara dan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

Lemhannas Goes to Campus merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai ketahanan nasional serta posisi Indonesia dalam dinamika global. Dalam paparannya di hadapan mahasiswa INSAN, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. T.B. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyebutkan bahwa peran penting perguruan tinggi sebagai motor penggerak literasi geopolitik karena Indonesia merupakan bagian dari tatanan global, sehingga setiap dinamika Internasional akan berdampak langsung terhadap kondisi nasional.

"Melalui penguatan kesadaran geopolitik ini, diharapkan mahasiswa mampu

memahami posisi strategis Indonesia serta berperan aktif dalam menjaga kedaulatan dan memajukan bangsa," pungkasnya.

Program Lemhannas Goes to Campus di tahun 2026 berdasarkan APBN rencananya akan dilaksanakan di empat kota yaitu Solo, Makassar, Bali dan Padang. Selain itu, Lemhannas juga akan terus dilaksanakan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh penjuru negeri dalam pelaksanaan Program Lemhannas Goes to Campus.

Program Lemhannas Goes to Campus diharapkan terus menjadi jembatan strategis antara Lemhannas RI dan perguruan tinggi dalam memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda. Melalui perluasan kegiatan ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan peran mereka sebagai agen perubahan serta calon pemimpin bangsa. Dengan demikian, generasi muda Indonesia diharapkan tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.



PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

P4N Angkatan LXIX Resmi Dibuka, **Gubernur Lemhannas RI Tekankan Lima Karakter Kepemimpinan Nasional**

“Selamat datang di kampus miniatur Indonesia. Saudara-saudara adalah figur terbaik yang terpilih dari institusi dan lembaga yang berasal dari berbagai unsur,”

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Hal tersebut disampaikan dalam Upacara Pembukaan Pendidikan Penyiapan dan Pematapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX pada Selasa (13/1).

P4N Angkatan LXIX diikuti oleh 110 peserta yang terdiri atas 48 peserta dari TNI, 28 peserta dari Polri, 21 peserta dari ASN, 7 peserta non-ASN, serta 6 peserta dari negara sahabat.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menekankan bahwa para peserta akan diintegrasikan di Lemhannas RI untuk mempelajari dan memahami masalah geopolitik serta pengaruhnya terhadap ketahanan bangsa dan negara, sekaligus menyamakan persepsi dan pemahaman sebagai kader pimpinan tingkat nasional. Pemahaman dan penyamaan persepsi tersebut menjadi sangat penting di tengah situasi

dunia yang semakin kompleks dengan tantangan multidimensi.

“Pendidikan ini menjadi wahana untuk membekali para pemimpin dengan kemampuan menganalisis, memahami, dan merumuskan kebijakan yang tepat di tengah dinamika global yang bergerak cepat,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Penyelenggaraan P4N Angkatan LXIX Lemhannas RI mengangkat tema “Pemantapan Kapasitas Pimpinan Tingkat Nasional Guna Mendukung Asta Cita dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Lemhannas RI menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan kepemimpinan ke depan, ketika bangsa Indonesia harus menyiapkan pemimpin yang mampu menghadapi dinamika lingkungan strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, selama mengikuti pendidikan di Lemhannas RI, para peserta akan dibekali berbagai pengetahuan guna mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Melalui berbagai pengetahuan dan isu strategis tersebut, diharapkan para

peserta mampu menjabarkan, menyusun, serta merumuskan berbagai kebijakan inovatif dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing guna menjawab tantangan aktual yang dihadapi bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional,” tutur Gubernur Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan harapannya agar para peserta memiliki lima karakter utama kepemimpinan nasional. Pertama, karakter negarawan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa. Kedua, berwawasan global dengan memiliki pemahaman tentang geopolitik serta pengaruhnya terhadap kondisi dinamis suatu bangsa dalam memperkuat ketahanan nasional.

Ketiga, memahami berbagai program dan kebijakan strategis nasional serta mampu menyumbangkan pemikiran yang solutif dan strategis guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keempat, memiliki kemampuan mengambil kebijakan strategis sesuai dengan kepentingan nasional dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kelima, memiliki kemampuan bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas untuk meraih tujuan dan cita-cita nasional.

“Manfaatkanlah secara optimal seluruh sarana dan prasarana agar proses penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan yang telah direncanakan,” ujar Gubernur Lemhannas RI mengakhiri sambutannya.



Hadiri RDP DPR RI,

Lemhannas RI Terus Berkomitmen Jalankan Tugas Guna Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., bersama jajaran pimpinan lembaga menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Komisi I, Jakarta, Senin (19/1). RDP tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian capaian kinerja dan pelaksanaan

program kerja Lemhannas RI Tahun Anggaran 2025, sekaligus pemaparan rencana program kerja Tahun Anggaran 2026.

Dalam forum tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 Lemhannas RI merealisasikan anggaran sebesar 98,90 persen. Realisasi tersebut terdiri atas program pembinaan ketahanan nasional sebesar 97,09 persen, program

dukungan manajemen sebesar 99,71 persen, serta belanja pegawai sebesar 99,05 persen.

Gubernur Lemhannas RI selanjutnya memaparkan capaian kinerja program pembinaan ketahanan nasional. Program ini dilaksanakan oleh Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional melalui Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68 dengan jumlah lulusan 110





orang, Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 sebanyak 100 orang, serta P3N Angkatan 26 sebanyak 89 orang. Pada pelaksanaannya, Lemhannas RI juga mengakomodasi peserta dari kelompok difabel serta memperhatikan komposisi gender.

Program pembinaan ketahanan nasional berikutnya dilaksanakan oleh Kedeputusan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang berperan memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, sekaligus membangun karakter kebangsaan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan antara lain Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PNNK), *Lemhannas Goes to Campus* yang menyasar generasi milenial dan Generasi Z, pelatihan bagi tenaga pendidik, Gebyar Wawasan Kebangsaan, serta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II.

Pada tahun 2025, Lemhannas RI juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan KPPD dalam bentuk retreat kepala daerah. Kegiatan ini bertujuan membentuk pimpinan daerah yang berkarakter negarawan, berpikir komprehensif, serta berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI memaparkan kontribusi Kedeputusan Pengkajian Strategik dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Sepanjang tahun 2025, Lemhannas RI menghasilkan dua belas rekomendasi

kebijakan strategis yang mencakup bidang ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, Lemhannas RI juga melaksanakan satu kegiatan asesmen krisis dan menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum ke-9.

Program lainnya adalah pengukuran ketahanan nasional yang menghasilkan penyempurnaan pemodelan sistem pengukuran ketahanan nasional, indeks ketahanan nasional dengan predikat cukup tangguh, pembentukan asesor kepemimpinan nasional, serta pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi guna menjamin kualitas pengajar ketahanan nasional.

Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Lemhannas RI. Salah satu Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, B.Comm., menilai program Lemhannas Goes to Campus memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan disinformasi, polarisasi sosial, serta mobilisasi opini publik berbasis teknologi. Menurutnya, fokus Lemhannas RI pada generasi milenial dan Generasi Z dinilai tepat, mengingat dominasi usia produktif di masa depan.

Menutup RDP, Gubernur Lemhannas RI berharap dukungan Komisi I DPR RI terus diberikan kepada Lemhannas RI dalam pelaksanaan tugas dan mandat strategis guna memperkuat ketahanan nasional serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Lemhannas RI Gandeng Sejumlah Mitra Strategis Perkuat Ketahanan Nasional

"Kekuatan fundamental bagi ketahanan nasional adalah kolaborasi seluruh unsur masyarakat untuk memastikan bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh, kuat, dan maju."

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman di Lemhannas RI pada Selasa (20/1).

Pada kesempatan tersebut, Lemhannas RI menandatangani nota kesepahaman

dengan Universitas Sriwijaya; Himpunan Pengusaha Muda Indonesia; ESQ Leadership Center; Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia; Pondok Pesantren Amanatul Ummah; PT Len Industri (Persero); PT Cipta Megaswara Televisi; Ikatan Alumni Universitas Indonesia; Jaringan Sekolah Islam

Terpadu Indonesia; Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia; Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia; serta PT Tigabelas Empat Lima.

Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa kehadiran para mitra strategis



tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, Lemhannas RI terus membuka ruang kolaborasi dan mendorong kerja sama yang terukur dan berkelanjutan guna memperkuat ketahanan nasional.

Menurut Gubernur Lemhannas RI, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Atas dasar itu, kerja sama lintas sektor menjadi elemen penting dalam membangun kekuatan nasional yang menyeluruh. "Ketahanan bangsa bukan hanya tugas pemerintah dan negara,

tetapi juga tugas masyarakat dan kita semua," ucap Gubernur Lemhannas RI. Ia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan konkret dan kerja nyata.

Direktur Utama Kompas TV, Rosianna Magdalena Silalahi, sebagai salah satu pihak yang menandatangani nota kesepahaman dengan Lemhannas RI, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Kompas TV dan Lemhannas RI merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun dan berkontribusi bagi bangsa. "Bagi Kompas TV, acara ini tidak sekadar penandatanganan kesepakatan,

tetapi merupakan suatu tanggung jawab," ujar Direktur Utama Kompas TV.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara Lemhannas RI dan HIPMI. Ia menilai bahwa pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Lemhannas RI memberikan dampak nyata terhadap kualitas kepemimpinan anggota HIPMI yang telah mengikutinya. Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi juga dapat diperluas hingga ke tingkat pengurus daerah.



LEMHANNAS GOES TO CAMPUS

Kepastian Hukum dan Stabilitas Ekonomi Menjadi Pilar Penting Ketahanan Nasional



"Sektor hukum dan ekonomi merupakan pilar ketahanan nasional. Kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan ekonomi kita berjalan dengan baik"

Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) memberikan kuliah umum dalam kegiatan Lemhannas Goes to Campus di Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai, Jumat (30/1/2026).

Dalam kuliah umum tersebut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa ketahanan nasional yang berkelanjutan bertumpu pada penguatan sektor hukum dan ekonomi. Pada aspek hukum, penegakan dan kepastian hukum menjadi prasyarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, mendukung pembangunan ekonomi, serta menjamin keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penguatan diplomasi multilateral diperlukan agar Indonesia mampu berperan strategis di tingkat global dan tidak terjebak dalam dominasi kekuatan besar.

Di bidang ekonomi, stabilitas dan kemandirian menjadi faktor penentu. Stabilitas ekonomi memungkinkan negara tetap tangguh menghadapi krisis, sedangkan kemandirian ekonomi mengurangi ketergantungan pada impor sehingga Indonesia tidak mudah terpengaruh tekanan eksternal. "Kalau hukum bisa ditegakkan, tentu kepastian dalam konteks ekonomi juga bisa diwujudkan," ujarnya.

Gubernur Lemhannas RI juga menyoroti sejumlah tantangan, antara lain ketidakpastian hukum dan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dibandingkan negara lain. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk kontribusi perguruan tinggi dan generasi muda. "Kalau kita ingin menjadi negara maju, maka salah satu caranya adalah menguatkan peran perguruan tinggi," tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP.; Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si.; Ketua Pembina Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai Afril Djoelianti; Ketua Al-Ishlahiyah Binjai Putri Susi Meilani Daulay, S.E.; Rektor INSAN Binjai Prof. Dr. Muhammad Ramadhan, M.A.; Plt. Deputi Kebangsaan Mayjen TNI Raden Djaenudin Selamat, S.E.; Kaban Kesbangpol provinsi Sumatra Utara Mulyono, S.T., M.Si.; Rektor Institut Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat Dr. Muhammad Saleh, S.H.I., M.A.; Wakil Ketua Bidang Akademik STKIP Budidaya Binjai Dr. Erlinda Nofasari, S.Pd., M.Pd.; jajaran pejabat INSAN; serta perwakilan tenaga ahli pengajar dan tenaga ahli pengkaji Lemhannas RI.

Ketua Mahkamah Konstitusi Sampaikan Peran MK dalam Pembangunan Nasional dan Penguatan Asta Cita

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., menyampaikan ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pematapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX pada Jumat (6/2), di Ruang NKRI Lemhannas RI. Dalam paparannya yang bertajuk “Peran MK dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional dan Memperkuat Asta Cita”, ia menegaskan posisi strategis MK dalam menjaga arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan konstitusi.

Suhartoyo menjelaskan bahwa tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme judicial review. Selain kewenangan tersebut, MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan itu menempatkan MK sebagai penjaga

konstitusionalitas dalam sistem ketatanegaraan.

Ia kemudian mengaitkan fungsi tersebut dengan pembangunan nasional dan Asta Cita. Menurutnya, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pembentukan undang-undang sebagai instrumen kebijakan negara. “Kalau kita cermati, ada hubungan korespondensi antara pembangunan nasional yang dicitakan oleh negara ini, salah satunya adalah melalui pembentukan undang-undang,” ujarnya. Undang-undang menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan negara, termasuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks itu, Suhartoyo menekankan pentingnya memastikan setiap undang-undang disusun untuk kepentingan bangsa dan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu. Peran MK hadir untuk menguji dan memastikan bahwa produk legislasi

yang dihasilkan Pemerintah dan DPR tetap sejalan dengan norma konstitusi serta melindungi kepentingan masyarakat luas.

Pada bagian akhir, ia menegaskan karakter putusan Mahkamah Konstitusi. MK berperan sebagai pelindung konstitusi, penafsir akhir konstitusi, pelindung demokrasi, pelindung hak asasi manusia, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Putusan MK bersifat final, erga omnes, dan self-executing. Final berarti tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Erga omnes berarti mengikat seluruh warga negara. Self-executing berarti berlaku serta-merta tanpa memerlukan tindakan eksekusi dari lembaga lain.





GUBERNUR LEMHANNAS RI:

Pemahaman Geopolitik adalah Bentuk Nasionalisme Masa Kini

Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyatakan bahwa pemahaman geopolitik merupakan bentuk nasionalisme masa kini. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana dan Magister Angkatan XLIII

Gelombang I Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Garut, Sabtu (14/2).

Dalam orasi berjudul “Wisudawan: Generasi Muda dan Tantangan Bangsa”, ia menegaskan bahwa wisuda bukan sekadar seremoni akademik, tetapi refleksi kontribusi perguruan tinggi dalam mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan berkarakter kebangsaan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, perguruan tinggi harus menjadi penggerak literasi geopolitik di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya membentuk kecerdasan intelektual. Pendidikan juga harus memperluas wawasan global generasi muda sebagai bagian dari bonus demografi, tanpa mengabaikan identitas nasional. “Memahami geopolitik dan menempatkan bangsa dalam posisi strategis merupakan wujud nyata nasionalisme baru di tengah ketidakpastian global saat ini,” ujarnya.

Gubernur kemudian mengaitkan peran wisudawan dengan sejarah perjuangan bangsa. Ia menegaskan bahwa generasi muda selalu hadir dalam momentum penting nasional, mulai dari lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Peristiwa Rengasdengklok, hingga Reformasi 1998. “Generasi adik-adik yang akan menentukan kemajuan bangsa,” katanya. Ia menilai semangat kepemudaan harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kontribusi nyata.

Dalam konteks kekinian, ia menyoroti tantangan sumber daya manusia.

Nilai Human Development Index Indonesia tahun 2025 tercatat sebesar 0,728 dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-113 dari 193 negara. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik pada November 2025 mencatat 7,46 juta jiwa pengangguran. Kondisi ini menunjukkan bahwa bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi jika tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan lapangan kerja. “Ketahanan nasional yang rapuh tidak akan bisa mewujudkan tujuan nasional,” tegasnya.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, ia mengajak para wisudawan membangun karakter kuat, berintegritas, mencintai tanah air, serta memiliki kesadaran geopolitik dan wawasan kebangsaan. Ia menekankan bahwa wisudawan sebagai kader pemimpin nasional harus visioner, transformatif, dan adaptif untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan yang sama, Lemhannas RI dan Universitas Garut menandatangani Nota Kesepahaman. Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat sinergi kedua institusi dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan wawasan kebangsaan.

Prof. Jimly Asshiddiqie Paparkan Sejarah dan Tantangan UUD NRI 1945 Menuju Indonesia Emas 2045



Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., memaparkan sejarah, proses perubahan, dan tantangan UUD NRI 1945 dalam ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pematapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX, Kamis (12/2). Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya evaluasi konstitusi sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045.

Prof. Jimly mengawali paparannya dengan menelusuri perkembangan sistem konstitusional Indonesia sejak kemerdekaan. Ia menjelaskan bahwa sejak 18 Agustus 1945 Indonesia resmi menjadi negara konstitusional dengan diberlakukannya UUD 1945. Namun, dinamika politik dan ketatanegaraan menyebabkan perubahan bentuk dan naskah konstitusi.

Pada 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi tersendiri. Republik Indonesia saat itu menjadi salah satu negara bagian. Setelah Mosi Integral dan kesepakatan kembali ke bentuk negara kesatuan, Indonesia memberlakukan

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1955 yang menghasilkan Konstituante dengan mandat menyusun konstitusi baru. Namun, Konstituante gagal mencapai kesepakatan. Situasi tersebut mendorong Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UUD 1945.

Prof. Jimly menyoroti perbedaan antara naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekret 5 Juli 1959. Perbedaan terletak pada bagian Penjelasan yang kemudian diposisikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstitusi. Praktik ini berlangsung hingga masa Orde Baru.

Memasuki era Reformasi, perubahan konstitusi dilakukan secara bertahap melalui empat kali perubahan pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Menurut Prof. Jimly, keempat perubahan tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh. Ia mencontohkan pergeseran kewenangan pembentukan undang-undang dari

Presiden kepada DPR melalui perubahan Pasal 20 dan Pasal 5 UUD 1945. Perubahan itu juga menambahkan Pasal 20 ayat (5) yang menegaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama Pemerintah dan DPR sah menjadi undang-undang dalam waktu paling lama 30 hari.

Ia menyatakan bahwa perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah melalui lima fase republik, yaitu UUD 1945 sebagai fase pertama, Konstitusi RIS sebagai fase kedua, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sebagai fase ketiga, kembali ke UUD 1945 melalui Dekret Presiden sebagai fase keempat, dan fase kelima setelah Reformasi.


Di akhir pemaparannya, Prof. Jimly mengajukan pertanyaan reflektif mengenai perlunya penyempurnaan konstitusi pascareformasi. Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap hasil perubahan selama sekitar 25 tahun terakhir perlu dilakukan, baik dari sisi norma maupun implementasi kebijakan. "Saatnya kita mendiskusikan upaya evaluasi," ujar Prof. Jimly.



PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

Kepala Perpusnas RI Tekankan Pentingnya Penguatan Literasi Nasional





Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Lemhannas RI, di Gedung Pancagatra–Jakarta, pada Senin (9/2). Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan materi mengenai posisi, misi, dan aksi Perpustakaan Nasional RI sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam paparannya, Prof. Aminudin menyoroti rendahnya tingkat literasi dan numerasi di Indonesia, khususnya dalam kemampuan membaca teks panjang. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas literasi masyarakatnya. Berdasarkan data yang disampaikan, rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca sekitar 5,91 buku per tahun atau setara setengah buku per bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi refleksi penting bagi semua pihak untuk memperkuat budaya baca di masyarakat.

Ia juga menguraikan enam faktor utama penyebab rendahnya literasi dan numerasi, yakni kompleksitas pemahaman konsep literasi di kalangan penggerak literasi, keterbatasan bahan bacaan yang sesuai minat masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung pasca membaca, rendahnya relevansi program literasi, keterbatasan kompetensi pengampu literasi, serta minimnya dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan.

Terkait peran Perpusnas RI, Prof. Aminudin menegaskan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai ruang pengembangan kreativitas dan

proses berpikir. “Saya selalu mengatakan apabila perpustakaan itu fungsinya seperti ini, maka sesungguhnya di perpustakaan itu harus terjadi penguatan literasi tingkat tinggi,” ujarnya.

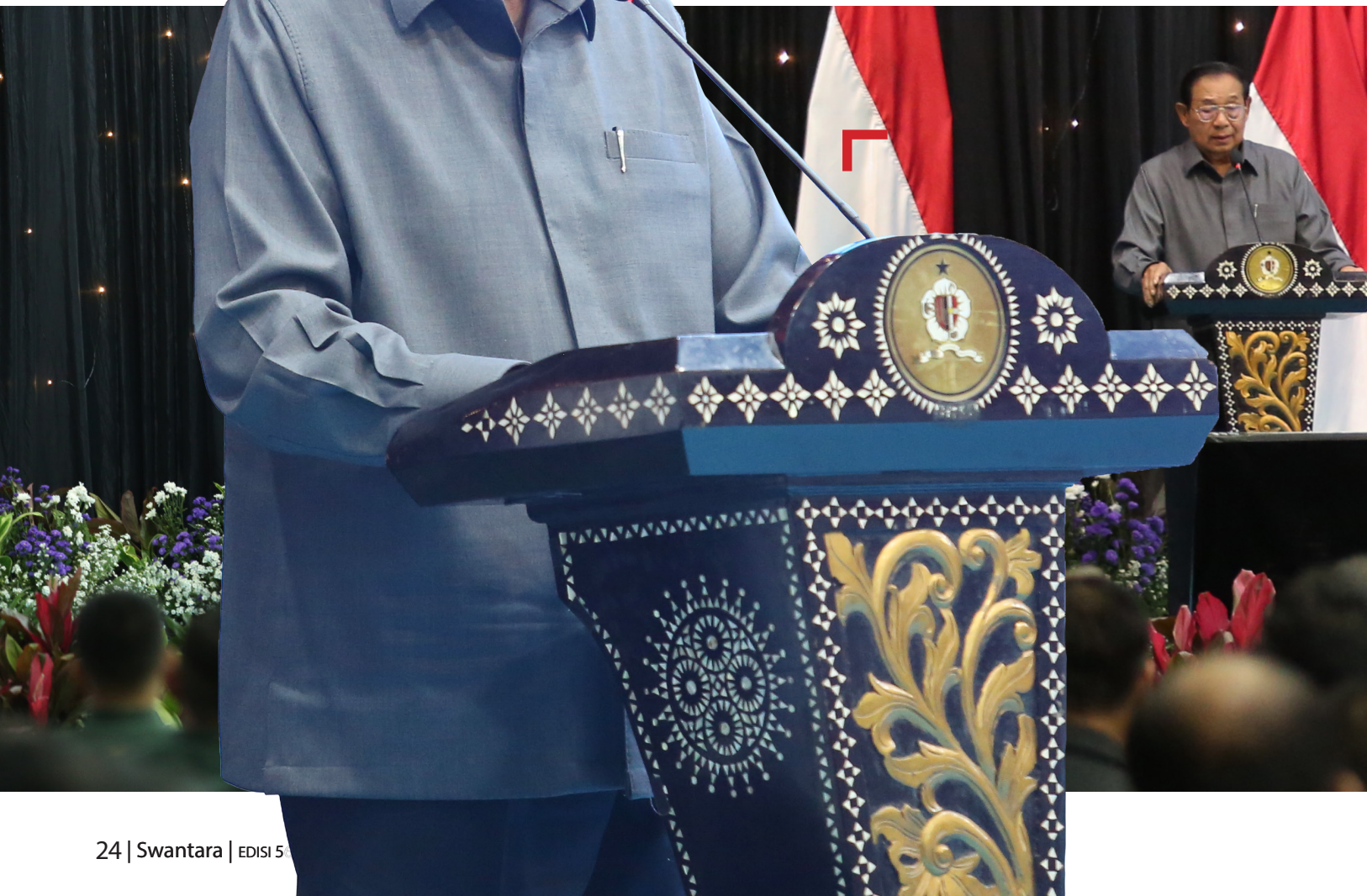
Untuk mendukung peran tersebut, Perpustakaan Nasional RI saat ini memiliki empat lokasi layanan, yakni di Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Salemba Raya di Jakarta Pusat, serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar dan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukittinggi. Menurutnya, peningkatan literasi juga memerlukan pengembangan keterampilan berpikir aras tinggi (*higher order thinking skills*), mulai dari memahami, menganalisis, hingga mencipta, dengan kreativitas sebagai indikator tertinggi literasi.

Dalam upaya memperkuat literasi nasional, Perpusnas RI menjalankan berbagai program prioritas, antara lain pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, pengarusutamaan naskah Nusantara, serta standarisasi dan akreditasi perpustakaan. Salah satu program dilaksanakan di 1.000 desa dengan melibatkan 21 perguruan tinggi negeri dan 15 mahasiswa di setiap lokus kegiatan. Program tersebut diperkuat melalui penyaluran bahan bacaan bermutu ke ribuan perpustakaan desa, puskesmas, komunitas, dan lembaga pemasyarakatan, serta melalui peran Relawan Literasi Masyarakat.

Saat ini, Perpustakaan Nasional RI memiliki koleksi sebanyak 3.564.166 judul atau 9.791.759 eksemplar yang didukung oleh berbagai layanan digital, seperti e-resources, iPusnas, INLIS, OPAC, Khastara, dan Indonesia One Search.

Susilo Bambang Yudhoyono Yakini Masa Depan Indonesia Berada Di Tangan Peserta Pendidikan Lemhannas RI

Presiden ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI (HOR.) (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., GCB., AC., memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX dan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII di Ruang Dwi Warna Lemhannas RI-Jakarta, Senin (23/2). Kegiatan tersebut turut dihadiri tenaga pengajar, tenaga pengkaji, tenaga profesor, serta pejabat umum di lingkungan Lemhannas RI.



Kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily. Menurut Gubernur, pengalaman kepemimpinan dan wawasan geopolitik global yang dimiliki Presiden ke-6 RI tersebut menjadi referensi penting bagi peserta pendidikan di Lemhannas RI dalam memahami dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam kuliah umum bertajuk "Great Power Rivalry in the Age of Global Disorder", Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti meningkatnya rivalitas kekuatan besar di tengah ketidakpastian global. Ia menilai bahwa sejumlah negara saat ini cenderung mengambil langkah unilateral tanpa melibatkan mekanisme multilateral sebagaimana yang lazim terjadi pada masa sebelumnya.

Menurutnya, kondisi global saat ini ditandai oleh meningkatnya ketegangan

geopolitik di berbagai kawasan, seperti hubungan Tiongkok dan Taiwan, konflik di Timur Tengah, serta dinamika politik di Amerika Latin. Ia menilai situasi tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan tatanan global yang ditandai oleh menguatnya kebijakan nasional yang cenderung ekstrem dan kurang mempertimbangkan dampak terhadap negara lain.

Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Ia menilai bahwa di tengah rivalitas kekuatan besar, ASEAN harus memperkuat solidaritas dan kapasitas kolektifnya. "Gunakan kesempatan sejarah. ASEAN menjadi salah satu solusi (dan) bagian dari solusi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa negara-negara ASEAN perlu mampu menyelesaikan berbagai persoalan internal secara

mandiri tanpa intervensi pihak luar. Menurutnya, kemampuan ASEAN menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemajuan kawasan merupakan faktor penting dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Di akhir kuliah umum, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan harapannya kepada para peserta pendidikan Lemhannas RI yang dipersiapkan menjadi pemimpin nasional di masa depan. "Tidak ada yang lebih bahagia dari masa senja saya nanti ketika melihat Indonesia merdeka dan ketika yang muda-muda mengambil tanggung jawab menjalankan misi *for our beloved country, for our beloved nation*," ujarnya. Ia menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi pemimpin yang sedang dipersiapkan melalui pendidikan strategis di Lemhannas RI.



Kepala BSSN RI:

Menjaga Keamanan Siber Pekerjaan Kolaboratif Berbagai Pemangku Kepentingan



Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M., memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra–Jakarta, pada Jumat (13/2). Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan materi mengenai implementasi kebijakan kewaspadaan dan keamanan siber dalam menghadapi ancaman multidimensional guna memperkuat ketahanan nasional.

Mengawali pemaparannya, Nugroho Sulistyo menegaskan bahwa peran BSSN tidak hanya terbatas pada aspek teknis keamanan siber, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Menurutnya, keamanan siber saat ini telah menjadi arena pertarungan geopolitik. “BSSN memiliki peran, fungsi, dan tugas yang erat kaitannya dengan keamanan dan kepentingan nasional, bahkan berkenaan dengan eksistensi kedaulatan bahwa BSSN bukan sekadar sebagai badan cyber security,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ancaman di ruang siber terus berkembang dan

bersifat multidimensional, mulai dari ancaman kinetik, serangan cyber logic, pemanfaatan spektrum frekuensi melalui internet, hingga kerentanan pada rantai pasok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan dinamika politik dan keamanan global.

Dalam paparannya, Nugroho Sulistyo juga menekankan bahwa menjaga keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama berbagai pemangku kepentingan. BSSN, menurutnya, berperan memonitor kerentanan dan memberikan peringatan, sementara perlindungan sistem membutuhkan keterlibatan aktif seluruh entitas.

“Di sinilah penting yang namanya awareness, kepedulian, dan kewaspadaan. Tanpa kepedulian dan kewaspadaan keamanan siber itu hanya menjadi suatu keniscayaan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ruang siber saat ini berada dalam kondisi yang penuh tantangan, ditandai dengan meningkatnya serangan yang berasal

dari aktor negara maupun nonnegara. Berdasarkan hasil pemantauan Security Operation Center BSSN, terdapat sekitar 700 juta lalu lintas mencurigakan di internet nasional dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, BSSN membentuk tim tanggap yang bertugas mengidentifikasi potensi kerentanan melalui pendekatan manajemen risiko. Setiap sistem elektronik dianalisis untuk menemukan celah kerentanan, baik dari aspek teknologi, tata kelola, maupun faktor lainnya. Setelah proses identifikasi dilakukan, langkah berikutnya adalah menerapkan upaya perlindungan guna menutup potensi kerentanan yang ada.

Menutup pemaparannya, Nugroho Sulistyo berharap para peserta P4N dapat meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap keamanan siber sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.



“Di sinilah penting yang namanya awareness, kepedulian dan kewaspadaan. tanpa kepedulian dan kewaspadaan keamanan siber itu hanya menjadi suatu keniscayaan”

Letjen TNI Drs. Nugroho Sulistyo Budi, M.M

BOAARD

SEPUTA KITA

of PEACE

DISKUSI PANEL

Wamenlu Soroti

Dampak Dinamika Global terhadap Ketahanan Nasional dalam Diskusi P3N Lemhannas RI



Perdagangan hari ini bukan lagi sekadar soal ekspor dan impor. Ia sudah menjadi instrumen politik, bahkan instrumen tekanan.

Arif Havas Oegroseno
Wakil Menteri Luar Negeri RI

Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII Lemhannas RI mengikuti diskusi panel bertema “Dampak Keanggotaan Republik Indonesia dalam Dewan Perdamaian terhadap Ketahanan Nasional”, di Gedung Pancagatra–Jakarta, pada Kamis (26/2). Diskusi tersebut menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Arif Havas Oegroseno menekankan bahwa dinamika perdagangan global saat ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan konstelasi geopolitik dunia. Ia menjelaskan bahwa perdagangan internasional telah berkembang menjadi instrumen politik yang digunakan dalam persaingan kekuatan besar. “Perdagangan hari ini bukan lagi sekadar soal ekspor dan impor. Ia sudah menjadi instrumen politik, bahkan instrumen tekanan,” ujarnya.

Ia menyoroti fenomena weaponizing trade, yaitu penggunaan instrumen perdagangan sebagai alat tawar dan tekanan politik dalam rivalitas negara-negara besar. Dalam konteks tersebut, Indonesia



Foto. Sekretariat Presiden RI

sebagai negara dengan ekonomi terbuka perlu memahami arah perubahan sistem global agar tidak terjebak dalam ketergantungan strategis yang berpotensi memengaruhi ketahanan nasional.

Diskusi juga menyinggung perkembangan isu global, termasuk Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803 Tahun 2025 tentang Comprehensive Plan bagi Palestina dan pembentukan Board of Peace (BoP) sebagai administrasi transisi Gaza. Resolusi tersebut memberikan mandat kepada negara-negara anggota PBB untuk berkontribusi dalam Board of Peace dan International Stabilization Force (ISF), baik dalam bentuk pendanaan maupun partisipasi personel.

Menanggapi hal tersebut, Arif menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menilai Indonesia

tidak dapat hanya menjadi pengamat dalam berbagai isu internasional tanpa memberikan kontribusi nyata. "Pertanyaannya, apakah kita hanya menjadi spectator? Apakah cukup hanya menyampaikan pernyataan keras di forum internasional tanpa kontribusi nyata? Politik bebas aktif menuntut partisipasi yang bertanggung jawab," tegasnya.

Menurut Arif, keanggotaan Indonesia dalam sistem perdagangan global perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan ekonomi. Ketahanan nasional saat ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi, posisi tawar dalam rantai pasok global, serta kemampuan menjaga kedaulatan kebijakan di tengah tekanan geopolitik. "Pertahanan nasional hari ini multidimensi. Ekonomi, perdagangan, dan diplomasi adalah bagian dari sistem pertahanan itu sendiri," ujarnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait ketidakpastian kebijakan global, fragmentasi sistem internasional, serta pilihan strategis Indonesia dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar. Melalui forum tersebut, peserta P3N Angkatan XXVII didorong untuk memahami bahwa tantangan ketahanan nasional semakin kompleks karena berkaitan langsung dengan dinamika ekonomi dan politik global.

Forum diskusi ini diharapkan dapat memperkuat perspektif strategis para peserta dalam melihat hubungan antara kebijakan ekonomi, diplomasi, dan pertahanan negara. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Indonesia dituntut untuk tetap aktif, cermat, dan berprinsip dalam menjaga kepentingan nasional serta kedaulatan negara.

PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

Wamentan RI Tekankan

Kepemimpinan Berkarakter untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan



Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI) Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A., memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Lemhannas RI, di Gedung Pancagatra–Jakarta, pada Kamis (26/2). Dalam kuliah umum tersebut, ia menyampaikan materi bertajuk “Kepemimpinan Berkarakter di Era Serakahnomics: Menghadirkan Nilai Budaya Adiluhung untuk Membangun Ekonomi Berkeadilan dan Ketahanan Bangsa”.

Mengawali kegiatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Pertanian RI yang bersedia berbagi wawasan kepada para peserta pendidikan Lemhannas RI. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dalam konteks penguatan ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan kesejahteraan di tengah masyarakat. “Kita ini negara kaya dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun, sebagian masyarakat kita masih belum menikmati kekayaan alam yang luar biasa ini. Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan prasyarat utama bagi ketahanan nasional kita,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan berkarakter dalam memastikan pengelolaan sumber daya negara dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam paparannya, Sudaryono menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan sektor ekonomi, terutama pertanian dan pangan. Ia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif, namun pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui perbaikan kebijakan pembangunan.

Sudaryono menekankan

pentingnya perubahan pendekatan dalam pengelolaan ekonomi nasional agar kekayaan negara dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. “Warung kita tambah besar, pelanggannya tambah banyak, omsetnya tambah besar, tetapi ternyata tidak membuat rakyat kita tambah kaya, yang ada justru kelompok menengah menurun dan yang miskin semakin miskin,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah perbaikan kebijakan, antara lain melalui peningkatan efisiensi anggaran negara, penguatan sektor pertanian, serta program swasembada pangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pemanfaatan sumber daya negara secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kuliah umum ini, para peserta pendidikan Lemhannas RI diharapkan memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai tantangan pembangunan nasional serta pentingnya kepemimpinan yang mampu mendorong kebijakan yang adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Warung kita tambah besar, pelanggannya tambah banyak, omsetnya tambah besar, tetapi ternyata tidak membuat rakyat kita tambah kaya, yang ada justru kelompok menengah menurun dan yang miskin semakin miskin”

Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A





Diplomasi Jalur Pendidikan: Membangun 'Strategic Trust' Kawasan Melalui Alumni Terbaik Lemhannas

Oleh Dr. Daniel Setiawan, S.T., M.Han.

Peserta Program The 11th Lemhannas Distinguished Graduands Visit

Diplomasi pertahanan sering kali dipahami sebatas penandatanganan pakta pertahanan, latihan militer bersama, atau pembelian alutsista. Namun, ada satu lapisan diplomasi yang kerap luput dari sorotan utama tetapi memiliki dampak jangka panjang yang fundamental: diplomasi pendidikan.

Pada 24 hingga 27 November 2025, delegasi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang terdiri dari lulusan terbaik P3N XXV dan P4N LXVIII melaksanakan The 11th Distinguished Graduands Visit (DGV) ke Singapura. Kunjungan ini bukan sekadar perjalanan wisata atau apresiasi akademis semata. Lebih dari itu, DGV merupakan instrumen strategis untuk membangun kepercayaan

(strategic trust) antara calon pemimpin masa depan kedua negara.

Mekanisme "Track-1 Defence Diplomacy"

Dalam pertemuan courtesy call dengan Menteri Pertahanan Singapura di Kementerian Pertahanan (MINDEF), satu poin krusial yang mengemuka adalah peran DGV sebagai engagement strategis pada level Track-1 Defence Diplomacy. Singapura memandang dialog kebijakan yang melembaga dan berulang, seperti program DGV ini, sebagai lapis utama dalam penyelesaian isu pertahanan kawasan.

Mengapa ini penting? Di tengah dinamika geopolitik yang cair, mispersepsi adalah

musuh terbesar stabilitas. Melalui interaksi langsung antara lulusan terbaik Lemhannas—yang notabene adalah calon pemegang keputusan strategis di TNI, Polri, dan birokrasi sipil—dengan petinggi pertahanan Singapura, kita membangun mekanisme pencegahan eskalasi ancaman. Kepercayaan strategis tidak dibangun di atas kertas perjanjian, melainkan melalui pertukaran sumber daya manusia (SDM) strategis antar-institusi pertahanan yang memperkuat kesinambungan kemitraan.

Menyelaraskan Persepsi Ancaman Hibrida

Kunjungan delegasi ke berbagai fasilitas strategis Singapura, seperti Digital Intelligence Service (DIS) dan



ASEAN Defence Minister's Meeting Cybersecurity and Information Centre of Excellence (ACICE), membuka wawasan baru tentang bagaimana tetangga kita memandang ancaman modern.

Singapura, melalui pembentukan DIS pada 2022, telah mengintegrasikan intelijen digital dan pertahanan siber sebagai matra tersendiri dalam Angkatan Bersenjata Singapura (SAF). Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi delegasi Indonesia bahwa intelijen pertahanan modern harus berorientasi pada data (data-driven intelligence) dan integrasi siber-intelijen untuk mempercepat pengambilan keputusan komando.

Kesamaan cara pandang terhadap ancaman non-tradisional—mulai dari serangan siber, disinformasi, hingga keamanan maritim yang dikelola oleh Information Fusion Centre (IFC)—menjadi modalitas penting. Ketika perwira Indonesia dan Singapura memiliki referensi ancaman yang selaras, kolaborasi di lapangan akan menjadi jauh lebih efektif.

Kemitraan Komplementer: SDA dan SDM

Salah satu kesimpulan strategis dari kunjungan ini adalah pengakuan terhadap posisi saling ketergantungan antara kedua negara. Singapura, dengan keterbatasan kedalaman geografis (strategic depth) dan sumber daya alam, bertumpu pada kualitas SDM unggul dan penguasaan teknologi. Sebaliknya, Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam (energi, mineral) dan potensi hilirisasi industri yang menjadi penopang stabilitas ekonomi kawasan.

Hubungan ini menciptakan keseimbangan komplementer. Dalam diskusi strategis, bahkan muncul kesepakatan untuk mendorong kolaborasi energi terbarukan (angin, solar farm, geotermal) di wilayah strategis seperti Batam dan Natuna. Ini membuktikan bahwa kerja sama pertahanan lintas negara dapat diselaraskan dengan proyek strategis yang memperkuat ketahanan energi regional.

Masa Depan Hubungan Bilateral

Keberlanjutan program DGV dan komitmen Singapura untuk mengirimkan perwiranya mengikuti pendidikan di Lemhannas RI (P4N 69 dan 70 TA 2026) adalah sinyal positif. Ini adalah investasi jangka panjang.

Ke depan, forum seperti DGV perlu diperluas cakupannya. Tidak hanya berfokus pada objek pertahanan militer, tetapi juga mencakup lembaga keamanan internal dan tata kelola infrastruktur digital, mengingat karakter ancaman modern yang bersifat hibrida.

Pada akhirnya, The 11th Lemhannas Distinguished Graduands Visit menegaskan kembali bahwa aset terpenting dalam diplomasi bukanlah senjata, melainkan manusia. Para alumni terbaik Lemhannas ini adalah jembatan hidup yang akan memastikan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura tetap hangat, saling percaya, dan produktif di tengah ketidakpastian dunia.



LEMHANNAS GOES TO CAMPUS:



MENJAGA WAWASAN NUSANTARA DI TENGAH KRISIS KESADARAN KEBANGSAAN

Laksma TNI Dr. Dwi Hartono, S.Pd., M.AP., M.Tr.Opsla

Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Wawasan Nusantara

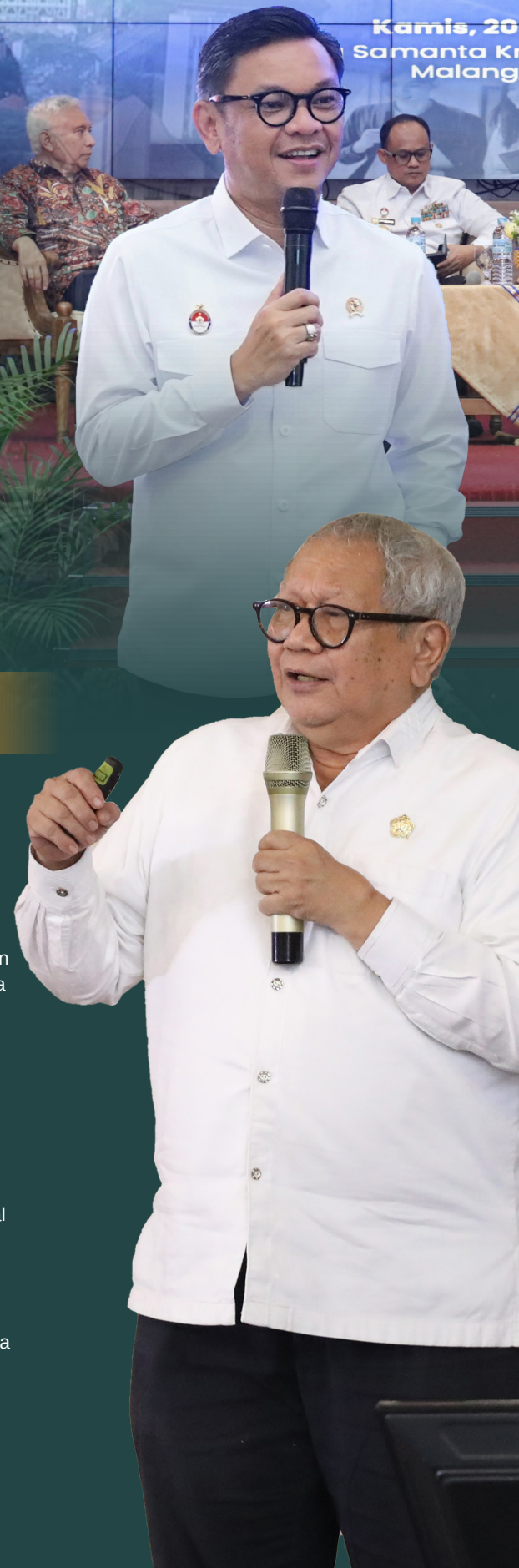
Pengantar: Krisis Sunyi Kesadaran Kebangsaan

Ketahanan nasional Indonesia tidak sedang runtuh oleh kekuatan eksternal, melainkan tergerus secara perlahan dari dalam. Ketahanan nasional saat ini tidak sedang diuji oleh agresi militer atau konflik terbuka. Tantangan yang justru mengemuka adalah ancaman non-militer yang bergerak perlahan dan kerap luput dari perhatian, yakni melemahnya kesadaran kebangsaan. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Lemhannas RI 2025 menempatkan gatra sosial budaya pada kategori "kurang tangguh" patut dibaca sebagai sinyal strategis bahwa fondasi persatuan bangsa membutuhkan penguatan yang lebih serius dan berkelanjutan.

Sehubungan hal tersebut, generasi muda, khususnya mahasiswa memegang peran kunci. Mereka adalah calon pemimpin masa depan, sekaligus kelompok yang

paling intens berinteraksi dengan arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta dinamika informasi yang bergerak cepat dan masif. Kampus, sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai, berada di titik strategis dalam upaya menjaga ketahanan nasional. Lebih jauh, penguatan wawasan nusantara di kampus adalah investasi jangka panjang ketahanan nasional. Ketika mahasiswa memiliki kesadaran kebangsaan yang matang, mereka tidak mudah terprovokasi oleh narasi ekstrem, tidak terjebak relativisme nilai, dan mampu memosisikan identitas global secara kritis tanpa kehilangan akar nasional. Inilah benteng ideologis paling efektif di era perang narasi.

Pada akhirnya, pertanyaan sederhananya adalah: "Apakah kampus akan dibiarkan menjadi ruang netral yang steril dari nilai kebangsaan, atau justru dijadikan kawah candradimuka pembentukan





karakter kebangsaan?”. Lemhannas Goes to Campus memberi peluang bagi pilihan kedua. Dan hari ini, data sudah bicara. Tinggal apakah kita bersedia mendengarnya.

Kampus dan Wawasan Nusantara Perguruan tinggi selama ini dipahami sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Namun dalam perspektif ketahanan nasional, kampus juga merupakan ruang strategis pembentukan nilai kebangsaan. Di sanalah cara pandang, sikap, dan orientasi generasi muda dibentuk, tidak hanya melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui budaya akademik dan interaksi sosial. Perubahan lingkungan strategis global telah membawa tantangan baru bagi kampus. Globalisasi dan digitalisasi menghadirkan berbagai ide, nilai, dan narasi lintas batas yang memengaruhi cara mahasiswa memaknai identitas kebangsaan. Ruang digital bahkan kerap menjadi arena utama pembentukan opini dan sikap, sering kali lebih dominan dibandingkan ruang kelas. Dalam situasi ini, kampus tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai ruang akademik, melainkan sebagai medan strategis ketahanan non-militer. Dalam konteks tersebut, mahasiswa berada pada posisi strategis. Di satu sisi, mereka adalah kelompok intelektual yang disiapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa. Di sisi lain, mereka merupakan kelompok paling rentan terhadap krisis identitas

kebangsaan. Kampus yang seharusnya menjadi kawah candradimuka pembentukan karakter nasional justru kerap terjebak pada netralitas nilai, sementara ruang digital menjadi arena utama pembentukan kesadaran ideologis mahasiswa. Fenomena ini memperlihatkan satu persoalan mendasar, bahwa wawasan nusantara dan nilai kebangsaan masih diperlakukan sebagai pengetahuan normatif, bukan sebagai kerangka hidup berbangsa. Mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika secara teoritis, tetapi tidak selalu menjadikannya sebagai rujukan etis dalam bersikap, berinteraksi, dan mengambil posisi di tengah konflik sosial maupun debat publik. Kesenjangan antara knowing dan acting inilah yang menjadi titik lemah gatra sosial budaya. Lemhannas Goes to Campus hadir dalam situasi strategis tersebut. Program ini merepresentasikan kehadiran negara di ruang pembentukan nilai generasi muda. Secara konseptual, langkah ini patut diapresiasi. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya proses pembentukan ideologi dan karakter mahasiswa kepada mekanisme pasar informasi dan algoritma media sosial. Namun demikian, apresiasi tidak boleh menutup ruang kritik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah “Sejauh mana Lemhannas Goes to Campus mampu menjawab akar persoalan lemahnya ketahanan sosial budaya?”

Wawasan Nusantara di Kampus: Alarm Ketahanan Sosial Budaya yang Tak Boleh Diabaikan

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi adalah “Bagaimana wawasan nusantara dipahami dan dihayati di lingkungan kampus?”. Kesenjangan antara pemahaman konseptual dan penghayatan nilai kebangsaan menjadi tantangan serius bagi ketahanan sosial budaya. Fenomena polarisasi, menguatnya sikap eksklusif, serta mudahnya penyebaran disinformasi menunjukkan bahwa daya rekat sosial belum sepenuhnya kokoh. Kondisi ini tentu tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan individu, melainkan perlu dipahami sebagai tantangan sistemik yang memerlukan pendekatan kebijakan yang tepat. Wawasan nusantara sejatinya dirancang sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam memaknai keberagaman sebagai kekuatan. Ketika nilai ini tidak terinternalisasi secara mendalam, maka potensi fragmentasi sosial menjadi semakin besar. Oleh karena itu, lemahnya penghayatan wawasan nusantara di kalangan mahasiswa harus dipandang sebagai alarm ketahanan sosial budaya yang tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, Wawasan nusantara juga menawarkan jawaban atas tantangan tersebut. Ia bukan sekadar konsep geopolitik, tetapi cara pandang integral tentang persatuan dalam keberagaman. Namun, kegagalan selama

ini terletak pada pendekatan pembelajaran yang terlalu menekankan hafalan dan definisi. Pendidikan kebangsaan berhenti pada tataran kognitif, tanpa menyentuh dimensi afektif dan praksis. Akibatnya, nilai kebangsaan tidak hidup dalam keseharian mahasiswa.

Dalam kerangka ini, Lemhannas Goes to Campus alangkah baiknya diposisikan sebagai instrumen transformasi, bukan sekadar transmisi pengetahuan. Program ini perlu menjadi ruang dialog kritis, tempat mahasiswa diajak merefleksikan realitas sosial, konflik identitas, intoleransi, dan perang narasi yang mereka hadapi sehari-hari. Tanpa keberanian untuk masuk ke wilayah problematik tersebut, penguatan wawasan nusantara akan kehilangan relevansinya.

Gatra Sosial Budaya “Kurang Tangguh?”

Data IKN Lemhannas RI 2025 memberikan dasar empiris atas kekhawatiran tersebut. Skor gatra sosial budaya sebesar 2,53 yang berada pada kategori “kurang tangguh” merupakan peringatan dini bahwa ketahanan nasional memiliki titik rawan di aspek non-militer. Dalam kerangka Asta Gatra, gatra sosial budaya berfungsi sebagai fondasi yang menopang ketahanan ideologi dan politik. Ketika fondasi ini melemah, maka ketahanan nasional secara keseluruhan akan ikut terdampak. Kondisi tersebut menempatkan gatra sosial budaya sebagai “medan tempur” utama ketahanan nasional. Ketika solidaritas melemah, toleransi tergerus, dan identitas nasional menjadi cair, maka ketahanan ideologi ikut terancam. Negara tidak boleh absen dalam ruang ini. Lemhannas Goes to Campus lahir dalam konteks tersebut. Sebuah ikhtiar membawa negara hadir di ruang pembentukan nilai generasi muda. Lebih khusus lagi, skor IKN 2,53 pada gatra sosial budaya sudah seharusnya menjadi alarm kebijakan bahwa pendekatan lama tidak lagi memadai. Negara tidak cukup hadir sebagai pemberi ceramah, tetapi harus berperan sebagai fasilitator pembentukan kesadaran. Lemhannas Goes to Campus perlu diintegrasikan secara sistemik dengan ekosistem pendidikan tinggi, seperti dalam kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, literasi digital, dan pembinaan karakter. Tanpa integrasi tersebut, program ini berisiko berjalan

sendiri, terputus dari realitas kampus. Kondisi tersebut menempatkan gatra sosial budaya sebagai “medan tempur” utama ketahanan nasional kontemporer. Ketika solidaritas melemah, toleransi tergerus, dan identitas nasional menjadi cair, maka ketahanan ideologi ikut terancam. Negara tidak boleh absen dalam ruang ini. Lemhannas Goes to Campus lahir dalam konteks tersebut. Sebuah ikhtiar membawa negara hadir di ruang pembentukan nilai generasi muda.

Namun jika dibiarkan berjalan secara simbolik, maka skor 2,53 itu akan tetap menjadi angka, bukan cambuk perubahan. Dan ketika negara terlambat membaca tanda-tanda, sejarah menunjukkan bahwa keruntuhan sering kali datang bukan dari luar, melainkan dari hilangnya kesadaran kebangsaan generasi mudanya sendiri.

Lemhannas Goes to Campus dan Pertaruhan Wawasan Nusantara Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan aktif di ruang publik berada di jantung persoalan ini. Mereka adalah calon pemimpin masa depan, tetapi juga generasi yang hidup sepenuhnya di era digital, ketika identitas, nilai, dan cara pandang dibentuk oleh arus informasi global yang bergerak cepat dan nyaris tanpa batas. Kampus, yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter kebangsaan, kini berhadapan dengan tantangan baru: “Bagaimana memastikan nilai Pancasila dan wawasan nusantara tetap relevan dan hidup di tengah dinamika tersebut?”. Dalam masalah inilah program Lemhannas Goes to Campus memiliki arti penting. Program ini merupakan wujud kehadiran negara di ruang pembentukan nilai generasi muda. Lemhannas RI, sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis dalam pemantapan nilai kebangsaan, berada pada posisi yang tepat untuk menjembatani negara dan dunia akademik. Lemhannas Goes to Campus memiliki potensi besar untuk memperkuat internalisasi wawasan nusantara di kalangan mahasiswa. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Tantangan kebangsaan yang dihadapi generasi muda saat ini bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga memerlukan ruang dialog, refleksi, dan partisipasi aktif. Pendekatan yang terlalu formal dan satu arah

berpotensi membatasi daya jangkau pesan kebangsaan.

Masa depan wawasan nusantara generasi muda, pada titik tertentu, ikut dipertaruhkan dalam keberhasilan program ini. Oleh karena itu, Lemhannas Goes to Campus perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab dinamika zaman dan kebutuhan mahasiswa sebagai subjek kebijakan.

Rekomendasi: Membaca Ulang Wawasan Nusantara di Kampus Melalui Lemhannas Goes to Campus

Pertama, memperkuat posisi Lemhannas Goes to Campus sebagai program strategis jangka menengah, dengan perencanaan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan dunia pendidikan tinggi.

Kedua, mendorong pendekatan dialogis dan partisipatif, sehingga mahasiswa terlibat aktif dalam memaknai nilai kebangsaan, bukan sekadar menerima materi. Pendekatan dialogis dan partisipatif akan membantu mahasiswa memaknai nilai kebangsaan secara kontekstual.

Ketiga, mengintegrasikan penguatan wawasan nusantara dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, agar nilai kebangsaan menjadi bagian dari pengalaman kampus sehari-hari.

Keempat, memperkuat algoritma kebangsaan dan literasi digital kebangsaan, sebagai respon terhadap tantangan disinformasi dan perang narasi di ruang siber.

Kelima, melakukan evaluasi berbasis dampak, dengan menekankan perubahan sikap dan kesadaran kebangsaan sebagai indikator utama keberhasilan program.

Penutup

Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara pada akhirnya dibangun dari kesadaran warganya. Kampus merupakan titik awal yang strategis dalam menjaga persatuan dan identitas nasional. Melalui Lemhannas Goes to Campus, negara memiliki peluang besar untuk memastikan bahwa wawasan nusantara tetap hidup dan relevan di tengah dinamika global dan digital. Jika dijalankan secara konsisten dan transformatif, program ini akan menjadi investasi penting bagi ketahanan nasional Indonesia di masa depan.

Batas Usia Anak di Ruang Digital

Akses digital sesuai usia anak telah diatur Berdasarkan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026

Di bawah 13 Tahun

Dapat memiliki akun pada Produk, Layanan dan Fitur (PLF) yang dirancang khusus untuk anak-anak dan memiliki **profil risiko rendah**

Wajib dengan persetujuan orang tua

Usia 13 - 16 Tahun

Dapat memiliki akun hanya pada PLF yang memiliki **profil risiko rendah**

Tetap dengan persetujuan orang tua

Usia 16 - 18 Tahun

Dapat memiliki akun pada PLF dengan **profil risiko lebih tinggi**

Tetap memerlukan persetujuan orang tua

PP TUNAS hadir untuk melindungi anak bukan membatasi tapi memastikan anak bisa belajar, bermain, dan tumbuh dengan aman di ruang digital

Rentang Usia Anak

3 - 5 Tahun

6 - 9 Tahun

10 - 12 Tahun

13 - 15 Tahun

16 - 18 Tahun

Kedaulatan di Balik Meja Makan: Belajar dari Rapuhnya Venezuela



Oleh: Brigjen TNI Tomi Kaloko Utomo, M.Sc.

Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Sistem Manajemen Nasional

Kedaulatan sebuah bangsa sering kali diuji bukan ketika peluru pertama melesat di perbatasan, melainkan saat piring-piring di meja makan rakyat mulai kosong. Inilah ironi pahit yang tercermin dari Venezuela. Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Venezuela seharusnya tampil sebagai kekuatan ekonomi global. Namun, realitas justru menunjukkan sebaliknya: negara tersebut berubah menjadi contoh nyata bagaimana kedaulatan politik dapat runtuh ketika ketahanan domestik—terutama ketahanan pangan dan ekonomi—gagal dijaga.

Bagi Indonesia, fenomena Venezuela merupakan alarm strategis yang relevan dengan semangat Nawacita, khususnya butir pertama: menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Perlindungan tersebut tidak semata dimaknai dalam konteks militer konvensional, tetapi juga mencakup pengamanan terhadap ancaman non-militer dan hybrid yang mengeksploitasi celah ekonomi, kerentanan sosial, serta potensi pengkhianatan dari dalam.

Paradoks Kelimpahan dan Perisai Hilirisasi

Krisis Venezuela menunjukkan bahaya ketergantungan ekstrem pada satu komoditas strategis. Ketika harga minyak dunia anjlok, fondasi ekonomi negara



ikut runtuh dan memicu inflasi yang melumpuhkan daya beli rakyat. Kondisi ini mempercepat delegitimasi negara di mata warganya sendiri.

Di sinilah kebijakan hilirisasi menjadi relevan, bukan sekadar sebagai strategi ekonomi, tetapi sebagai instrumen pertahanan negara. Hilirisasi selaras dengan Nawacita dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik. Dengan menguasai nilai tambah sumber daya alamnya sendiri, sebuah negara membangun resilience terhadap guncangan global dan tekanan geopolitik. Tanpa kedaulatan ekonomi, kedaulatan pertahanan akan berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Celah Keamanan: Dari Perut Rakyat hingga Simbol Negara

Krisis ekonomi yang berkepanjangan tidak hanya melemahkan negara dari sisi fiskal, tetapi juga membuka celah serius dalam keamanan nasional. Upaya intervensi asing di Venezuela—termasuk skenario penculikan presiden dan percobaan kudeta seperti Operation Gideon—menunjukkan bahwa ancaman terhadap simbol negara sering kali berawal dari krisis domestik.

Ketika kebutuhan dasar rakyat tidak terpenuhi dan tekanan ekonomi menggerus integritas aparatur negara, sistem pengamanan pimpinan nasional menjadi rentan terhadap infiltrasi asing. Dalam konteks ini, pengamanan presiden tidak dapat dipahami secara sempit sebagai urusan barikade fisik semata. Stabilitas ekonomi dan kesejahteraan aparat adalah benteng terluar yang menjaga kewibawaan dan legitimasi simbol negara.

Cermin Sejarah Indonesia: Watak Pengkhianatan dan Divide et Impera

Belajar dari Venezuela, Indonesia perlu bercermin secara jujur pada sejarahnya sendiri. Bangsa ini tidak steril dari praktik pengkhianatan internal yang dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Penangkapan Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Pattimura, Sultan Hasanudin dan pahlawan nasional

lainnya merupakan keberhasilan politik divide et impera kolonial Belanda menjadi bukti bahwa perpecahan internal sering kali menjadi pintu masuk utama runtuhnya kedaulatan.

Kesadaran historis ini penting agar pengamanan negara—terutama pengamanan Presiden selaku Kepala Negara dan Pemerintahan agar tidak terjebak pada pendekatan teknis semata, tetapi juga menyentuh aspek karakter, integritas, dan ketahanan ideologis aparatur pengamanan.

Mitigasi Insider Threat: Agenda Strategis Pengamanan VVIP

Pengamanan Presiden sebagai simbol kedaulatan negara menuntut reformasi berkelanjutan, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia satuan pengamanan VVIP.

Pertama, rekrutmen berbasis deep background screening. Proses seleksi harus mencakup developed vetting yang menilai aspek finansial, ideologis, dan jejaring sosial calon personel. Uji ketahanan integritas menjadi krusial untuk memastikan personel tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan ekonomi maupun bujukan asing.

Kedua, pembinaan mental dan kontra-narasi divide et impera. Pendidikan Paspampres perlu memperkuat literasi intelijen strategis dan pemahaman hybrid warfare. Melalui pembelajaran sejarah kritis, personel ditanamkan kewaspadaan kolektif dan budaya saling mengawasi demi menjaga integritas institusi.

Ketiga, kesejahteraan sebagai fungsi pengamanan. Kesejahteraan personel bukan isu administratif semata, melainkan bagian dari keamanan nasional. Remunerasi dan jaminan hidup yang layak adalah prasyarat utama agar loyalitas tidak menjadi komoditas yang dapat dibeli pihak luar.

Keempat, rotasi jabatan dan pemanfaatan teknologi. Rotasi periodik di unit inti mencegah terbentuknya faksionalisme dan kedekatan personal yang berlebihan dengan subjek pengamanan. Secara khusus, personel pengawal Ring 1 (Walpri) tidak

sepatutnya digunakan secara terus-menerus sepanjang masa jabatan Presiden yang sama. Pembatasan masa tugas dan pergantian terencana menjadi krusial untuk menjaga profesionalisme, objektivitas, serta memutus potensi loyalitas personal yang melampaui loyalitas institusional. Kondisi kedekatan yang berlangsung lama tersebut juga rawan dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan penggalangan terhadap yang bersangkutan, baik melalui tekanan ekonomi, kompromi personal, maupun pendekatan ideologis terselubung. Rotasi yang terukur juga berfungsi sebagai langkah mitigasi insider threat, karena mempersulit upaya penetrasi jangka panjang oleh pihak asing. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pemantauan perilaku berbasis analitik modern dapat menjadi sistem peringatan dini terhadap indikasi anomali psikologis, perubahan pola hidup, maupun upaya rekrutmen asing.

Penutup

Pengamanan Presiden adalah benteng terakhir kedaulatan negara. Pelajaran dari Venezuela menegaskan bahwa ancaman terhadap simbol negara sering kali berakar pada kegagalan mengelola ketahanan domestik. Dengan mereformasi manajemen SDM pengamanan VVIP dan menempatkannya dalam kerangka besar Nawacita, Indonesia dapat memastikan bahwa Paspampres bukan hanya perisai fisik, tetapi juga perisai ideologis yang tangguh menghadapi ancaman modern.

Kedaulatan NKRI adalah harga mati—dan ia hanya dapat dijaga melalui kecerdasan mengelola sumber daya, ketangguhan ekonomi, serta kewaspadaan tanpa henti terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Pada titik inilah kesejahteraan aparatur pengamanan harus ditempatkan sebagai unsur utama pembentuk loyalitas. Loyalitas sejati tidak tumbuh dari doktrin semata, melainkan dari kepastian negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi prajuritnya. Aparatur yang sejahtera adalah aparatur yang sulit digoyahkan, tidak mudah dibeli, dan tetap tegak menjaga kehormatan serta kedaulatan negara.

MARSEKAL PERTAMA TNI

ALDRIN PETRUS MONGAN S.T., M.Hum., M.Han

Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI

Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan, S.T., M.Hum., M.Han. saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI, posisi yang menempatkannya pada peran penting dalam pengembangan sistem pengukuran ketahanan nasional, termasuk Indeks Ketahanan Nasional. Peran ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang berakar dari kehidupannya.


Ia lahir di Laikit, Minahasa, pada 24 Februari 1971 sebagai anak bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya, Albert Simon Mongan, adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat, sementara ibunya, Jetje Pangemanan, menjadi sosok yang kuat dalam membentuk nilai-nilai kehidupannya.

Masa kecil Aldrin tidak diwarnai oleh kehidupan khas keluarga militer. Ia lahir menjelang orang tuanya pensiun, sehingga tumbuh dalam lingkungan kampung dengan kondisi yang sederhana. Tidak ada asrama, tidak ada fasilitas militer, hanya kehidupan sehari-hari masyarakat yang berjalan apa adanya.

"Keluarga sudah tinggal di kampung sehingga kehidupan yang dijalani relatif sederhana seperti masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, orang tua selalu menanamkan nilai-nilai yang kuat, seperti integritas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab," ungkapnya.

Memasuki masa remaja, arah hidupnya mulai terbentuk dengan lebih jelas. Ia





“...orang tua selalu menanamkan integritas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab...”

melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Manado, dan pada fase ini ia mulai aktif dalam kegiatan Pramuka. Di sinilah ia pertama kali merasakan proses kompetisi yang terstruktur dan berjenjang.

Melalui seleksi dari tingkat sekolah hingga daerah, ia terpilih untuk mengikuti Jambore Nasional di Cibubur pada tahun 1986. Pengalaman ini menjadi salah satu titik balik penting dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia berinteraksi dalam skala nasional dan melihat langsung bagaimana proses pencapaian dibangun secara bertahap.

Pengalaman di Cibubur juga memperluas wawasannya tentang dunia di luar kampung. Ia melihat langsung infrastruktur modern dan bertemu tokoh nasional seperti Dr. Pratiwi Sudarmono.

Di fase ini, satu karakter semakin menonjol dalam dirinya: rasa ingin tahu. Karakter ini lah yang mendorongnya untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan militer, terutama dari cerita-cerita yang ia dengar di lingkungan keluarga. Dari sana, perlahan muncul keinginan untuk menjadi bagian dari dunia tersebut.

“Pengalaman-pengalaman itu juga mungkin yang menginspirasi saya. Jadi tanpa disuruh atau diarahkan apa pun, saya sendiri memiliki keinginan untuk masuk menjadi tentara,” jelasnya.

Keputusan tersebut bahkan diambil dengan cara yang cukup berani. Ia mendaftar tanpa sepengetahuan penuh orang tua. “Saya juga sebenarnya mendaftar tanpa diketahui sepenuhnya oleh orang tua,” ungkapnya.

Ketika akhirnya dinyatakan lulus dan diterima sebagai taruna Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 1989, ia memasuki dunia yang sepenuhnya berbeda. Pendidikan militer menuntut disiplin tinggi, ketahanan fisik, serta kesiapan mental yang kuat. Fase ini menjadi awal

transformasi dari kehidupan sipil menuju kehidupan sebagai prajurit profesional.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar militer, Aldrin melanjutkan ke Sekolah Penerbang (Sekbang). Di tahap ini, tuntutan tidak lagi sebatas pada kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan fisik yang harus selalu terjaga. Ia memandang profesi penerbang bukan sebagai pekerjaan biasa, melainkan sebagai pilihan yang menuntut keberanian menghadapi batas manusia itu sendiri.

“Pada dasarnya, untuk profesi penerbang itu seperti kita melawan takdir. Manusia sebenarnya tidak ditakdirkan menjadi burung yang hidup di udara,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan fase pendidikan, ia bertugas sebagai penerbang Lockheed C-130 Hercules. Selama kurang lebih 15 tahun, Aldrin menjalani penugasan dengan mobilitas tinggi, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, sering kali dalam waktu yang sangat singkat. “Pagi hari saya bisa makan di satu tempat, siang hari sudah berada di tempat lain, malam hari bisa berada di tempat yang berbeda lagi,” tuturnya.

Pesawat Hercules yang ia operasikan memiliki peran yang jauh melampaui fungsi transportasi. Dalam berbagai situasi, pesawat ini menjadi tulang punggung logistik nasional, terutama saat negara menghadapi bencana atau kebutuhan mendesak.

Melalui penugasan ini, ia terlibat dalam berbagai operasi di wilayah strategis seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur. Ketiga wilayah tersebut pada masanya menjadi titik dengan intensitas operasi yang tinggi, baik dalam konteks keamanan maupun



Tari. Di posisi ini, tugasnya tidak lagi berhenti pada aspek teknis militer, tetapi menyentuh berbagai aspek yang lebih kompleks, termasuk hubungan dengan masyarakat sipil dan instansi lain.

Perannya kemudian berkembang ketika ia dipercaya menjalankan penugasan di Mabes TNI. Di lingkungan ini, ia mulai terlibat dalam proses perencanaan strategis dan perumusan kebijakan sebagai Paban I/Ren Sops TNI. Perspektifnya pun bergeser. Ia tidak lagi hanya menjalankan keputusan, tetapi ikut berada dalam proses bagaimana keputusan itu dibentuk.

Keterlibatannya di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI sebagai Wakil Komandan semakin memperkaya pengalamannya. Di sini, ia berhadapan dengan dinamika operasi internasional, yang menuntut pemahaman lintas negara dan konteks global yang lebih luas.

Di sisi lain, ia terus mengembangkan kapasitas dirinya melalui berbagai pendidikan militer dan strategis, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah menjalani pendidikan di Singapore Command and Staff College (SCSC) pada tahun 2008. Pendidikan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah cara pandangnya terhadap persoalan pertahanan dan keamanan.

Di luar peran formal sebagai prajurit dan pemimpin, Aldrin juga menunjukkan bentuk pengabdian lain melalui berbagai kegiatan sosial dan prestasi yang melibatkan masyarakat. Ia tidak membatasi kontribusi hanya dalam lingkup kedinasan, tetapi memperluasnya ke ruang yang lebih langsung dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu yang menonjol adalah perolehan empat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Namun di balik angka tersebut, terdapat cerita dan upaya yang tidak sederhana.

Salah satunya terjadi di Pulau Selaru, wilayah terluar yang tidak mudah dijangkau. Di sana, ia memimpin kegiatan pembentangan bendera sebagai simbol kehadiran negara. "Perjalanan ke sana

memperkaya cara pandangya terhadap kompleksitas tugas negara.

Dari sekian banyak pengalaman, satu peristiwa menjadi titik yang paling membekas, yaitu saat bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Dalam situasi yang serba tidak pasti, ia menjadi salah satu penerbang pertama yang masuk ke wilayah terdampak. Namun, pendaratan tidak bisa dilakukan secara langsung. Kondisi landasan harus dipastikan secara visual karena tidak ada informasi yang dapat diandalkan dari bawah.

"Saya melakukan overhead di atas bandara. Saya merendah, kemudian naik lagi, lalu kembali melakukan putaran di atas landasan. Ketika berada di atas runway, saya tidak langsung mendarat," ceritanya.

Situasi di darat jauh dari kondisi normal. Fasilitas bandara rusak, tower pengendali tidak berfungsi, dan tidak ada komunikasi yang dapat direspons. Sementara itu, pesawat-pesawat lain, termasuk dari luar negeri, terus mencoba masuk ke wilayah yang sama. "Pada saat itu saya seperti menjadi tower terbang di atas Aceh," tegasnya.

Dari udara, ia membantu merelay komunikasi, memastikan keberadaan pesawat lain, serta menjaga koordinasi agar tidak terjadi risiko yang lebih besar. Keputusan-keputusan diambil tanpa dukungan sistem yang normal, hanya mengandalkan pengalaman, penilaian situasi, dan ketenangan dalam tekanan.

Pengalaman serupa juga terjadi dalam berbagai misi kemanusiaan lainnya. Salah satunya ketika terjadi kelaparan di Yahukimo, Papua. Dalam kondisi geografis yang sulit dijangkau, pesawat Hercules kembali menjadi satu-satunya sarana distribusi bantuan.

Dalam setiap misi, tugas yang dijalankan bukan hanya soal penerbangan, tetapi tentang bagaimana memastikan bantuan dapat sampai kepada mereka yang membutuhkan. Di titik ini, perannya sebagai penerbang menjadi bagian langsung dari upaya negara dalam merespons krisis dan menjaga kehidupan masyarakat.

Setelah bertahun-tahun berada di kokpit sebagai penerbang Hercules, perjalanan Aldrin Petrus Mongan perlahan bergerak ke arah yang berbeda. Ia tidak lagi hanya terlibat dalam pelaksanaan operasi, tetapi mulai memikul tanggung jawab yang lebih luas sebagai pemimpin.

Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia melalui berbagai penugasan yang secara bertahap memperluas ruang perannya. Dari yang semula berfokus pada misi penerbangan, ia mulai berhadapan dengan pengelolaan organisasi, sumber daya, serta dinamika koordinasi lintas sektor.

Penugasan sebagai Komandan Pangkalan Udara menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan tersebut. Ia memimpin beberapa pangkalan strategis seperti Ngurah Rai, Pattimura, dan El

menggunakan perahu kecil karena tidak ada dermaga. Jadi kami turun langsung dari perahu ke laut, kemudian berjalan ke pantai,” ungkap Aldrin.

Perjalanan yang berat, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghalang. Justru dalam kondisi seperti itulah makna kegiatan menjadi lebih terasa, bukan sekadar simbolik, tetapi sebagai bentuk nyata kehadiran negara di wilayah terdepan.

Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan sosial, terutama operasi katarak gratis di berbagai daerah seperti Ambon dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam skala besar, bahkan secara serentak di banyak wilayah, menunjukkan upaya yang tidak hanya sporadis, tetapi terencana dan berkelanjutan.

Keterlibatan tersebut bukan sekadar tambahan aktivitas, tetapi bagian dari komitmen pribadi. Setiap tahun, ia berusaha tetap menjalankan kegiatan sosial sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat.

Di kampung halamannya, ia juga pernah menginisiasi kegiatan pengolahan bahan pangan lokal, seperti berbagai olahan berbahan dasar pepaya. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan rekor, tetapi juga mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat setempat.

Dalam perannya sebagai Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI, tanggung jawab yang diemban semakin bersifat

strategis. Bagi Aldrin, Puslab Lemhannas RI bukan sekadar unit pendukung, tetapi menjadi salah satu pilar dalam menghasilkan instrumen pengukuran yang digunakan untuk membaca kondisi ketahanan nasional.

Di Pusat Laboratorium Lemhannas RI, peran Aldrin Petrus Mongan mengembangkan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas), yang menghasilkan Indeks Ketahanan Nasional sebagai alat untuk membaca kondisi bangsa secara menyeluruh.

Sistem ini bukan sesuatu yang baru dibangun, melainkan telah melalui proses panjang sejak pertama kali dikembangkan pada tahun 2006. Seiring waktu, berbagai penyempurnaan terus dilakukan hingga akhirnya melahirkan versi terbaru pada tahun 2025. Perubahan tersebut tidak sekadar pembaruan teknis, tetapi upaya untuk menyesuaikan metode dengan kebutuhan zaman yang terus bergerak.

“Pada versi sebelumnya terdapat sekitar 882 indikator. Sekarang kita sederhanakan menjadi sekitar 448 indikator,” jelasnya.

Penyederhanaan itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi kedalaman analisis, tetapi justru untuk membuat sistem lebih relevan dan dapat dijalankan secara efektif. Di tengah keterbatasan data dan tuntutan kecepatan pengambilan keputusan, pendekatan yang lebih ringkas menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan.

Perubahan lain yang cukup mendasar terlihat pada cara sistem ini digunakan. Jika sebelumnya indeks disusun setahun sekali, kini ia mendorong agar pengukuran dilakukan secara berkala dalam rentang waktu yang lebih pendek.

“Sekarang kita sudah bisa menyusun indeks secara triwulanan,” jelas Aldrin yang mulai menjabat sebagai Kapuslab Lemhannas RI sejak April 2025.

Dengan ritme yang lebih cepat, sistem ini diharapkan mampu mengikuti dinamika yang terus berubah, terutama dalam lingkungan strategis yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Ketahanan nasional tidak lagi dipahami sebagai kondisi statis, tetapi sebagai sesuatu yang harus terus dipantau dan diperbarui.

Namun, di balik berbagai capaian tersebut, ia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Harapan terhadap Puslab sangat besar, sementara kondisi di lapangan tidak selalu sejalan. “Kalau saya ibaratkan seperti timbangan, jarak antara ekspektasi dan kondisi di lapangan itu sangat besar. Gap-nya sangat tinggi,” tegasnya.

Di satu sisi, Puslab memegang peran strategis dalam menghasilkan data dan analisis yang digunakan dalam pengambilan kebijakan. Di sisi lain, unit ini harus menjalankan berbagai fungsi sekaligus dengan sumber daya yang terbatas. “Puslab memiliki jumlah personel yang paling sedikit tetapi harus menjalankan lima hingga enam proses bisnis sekaligus,” ungkapnya.

Kondisi ini menuntut cara kerja yang tidak biasa. Menurut Aldrin, arah pengembangan ke depan tidak hanya berfokus pada penyempurnaan sistem yang ada, tetapi juga pada transformasi yang lebih luas. Ia mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan relevansi data.

Bagi Aldrin, pengukuran ketahanan nasional bukan sekadar menghasilkan angka, tetapi membangun cara pandang yang lebih utuh tentang kondisi bangsa. Di situlah peran Puslab Lemhannas RI menjadi penting, sebagai penghubung antara data, analisis, dan keputusan yang diambil di tingkat strategis.



Kunjungan Tim Pokja Labkurtannas Pusat Laboratorium Lemhannas RI ke Badan Pangan Nasional RI dalam rangka Sinkronisasi Data Pengukuran Ketahanan Nasional pada Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANNAS)



Ikcha Maulidya

Belajar, Bertumbuh, dan Mengabdikan

Lahir di Jakarta, Ikcha Maulidya yang akrab disapa Ikcha tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai tanggung jawab dan kesederhanaan. Kedua orang tuanya selalu menanamkan pentingnya pendidikan sebagai bekal kehidupan. Dirinya yang tumbuh sebagai anak tunggal selalu dibiasakan untuk memahami bahwa setiap proses kehidupan membutuhkan ketekunan.

Ikcha menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas di Bekasi. Selama proses belajar tersebut, kedua orang tuanya selalu menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sarana untuk mendapatkan capaian akademik yang sempurna. "Kedua orang tuaku selalu menekankan kalau pendidikan bukan hanya soal capaian akademik, tapi juga sebagai tempat untuk pembentukan karakter dan cara berfikir ketika menyikapi berbagai persoalan." tuturnya.

Masa remaja bagi ASN yang telah berdinastikan di Lemhannas RI selama 11 tahun ini merupakan fase yang penting dalam pembentukan jati diri. Pada periode tersebut, dirinya belajar mengenali diri, mengelola tantangan, serta menumbuhkan kemandirian.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Ikcha Maulidya melanjutkan studi ke jenjang Strata Satu (S1) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Awalnya, Ikcha sempat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di Universitas Indonesia melalui jalur SPMB dengan memilih dua program studi yang ia minati, yaitu Hubungan Internasional dan Sastra Inggris. Namun, ia belum berhasil diterima.

Pantang menyerah, Ikcha kembali mengadu nasib dengan mendaftar ke program D3 Sastra Inggris di Universitas Indonesia serta jurusan Psikologi di UIN Syarif Hidayatullah. Usahanya membuahkan hasil karena ia diterima di kedua perguruan tinggi tersebut. Setelah melalui berbagai pertimbangan, ia pun menandatangani pilihan pada program S1 Psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai jenjang pendidikan yang akan ditempuhnya.

Ikcha menuturkan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan S1, ia sempat

pikir lagi, kan belum tentu lulus juga ya, ikutin aja lah, eh lulus (tes CPNS)" ujarnya sambil tertawa.

Ikcha menuturkan bahwa ia pertama kali diterima sebagai ASN di Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI dengan jabatan Asesor SDM. Seiring berjalannya waktu, ia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Subbagian di Direktorat Pengkajian Sosial Budaya, Kedeputian Pengkajian Strategik Lemhannas RI hingga akhirnya ia diangkat menjadi Analis Kebijakan Muda dengan proses inpassing.

Ibu dari tiga anak ini mengungkapkan bahwa perjalanan karier sebagai ASN hingga saat ini merupakan proses pembelajaran yang berkelanjutan, meskipun peran yang dijalankan tidak

ibu untuk ketiga anaknya. Namun, hal itu ternyata sulit dilakukan."Karena kan aku S1 udah lama banget ya. Dari lulus sampai S2 ini jaraknya 18 tahun. Jadi ilmu yang aku dapat waktu S1 itu sudah lama dan harus belajar lagi dari awal," jelasnya sambil tertawa.

Ikcha akhirnya memutuskan untuk lebih fokus dengan kuliahnya agar dapat segera menyesuaikan diri. Tantangan lain muncul saat dirinya sedang proses menyelesaikan tesis. Dinamika penentuan judul hingga persetujuan Dosen Pembimbing membuatnya semakin terpacu agar dapat menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh Universitas Indonesia. Setelah menempuh pendidikan selama tiga tahun sejak tahun 2022 hingga 2025 lalu, Ikcha dinyatakan lulus dan dapat kembali mengabdikan dirinya menjadi ASN di Lemhannas RI.

Setelah kembali bekerja di Lemhannas RI, Ikcha menuturkan dirinya berusaha segera menyesuaikan diri sebagai Analis Kebijakan Muda. Berbagai tantangan pekerjaan membentuknya menjadi pribadi yang lebih adaptif dan reflektif. Dalam bekerja, ia berupaya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, terus belajar, serta tidak melupakan peran sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab keluarga dan sosial. "Niat yang lurus itu selalu jadi peganganmu," tuturnya.

Dukungan orang tua, suami dan ketiga anaknya disebut Ikcha menguatkannya menjalankan peran gandanya sebagai ibu bekerja. "Keluarga itu sumber kekuatan yang menyeimbangkan pengabdian sebagai ASN dan kehidupan pribadi," jelasnya

Kedepannya, Ikcha berharap dirinya dapat terus belajar dan berkontribusi untuk Deputi Bidang Pengkajian Strategik, unit kerja tempatnya bekerja di Lemhannas RI dalam melakukan kajian yang relevan dengan dinamika zaman sekaligus mendorong agar dampak kajian Lemhannas bisa semakin luas. "Aku juga berharap kajian yang dihasilkan semakin mendalam dan kontekstual dalam merespons isu-isu aktual yang berpengaruh terhadap ketahanan nasional, sehingga dapat memberikan masukan yang bermakna bagi negara dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," jelasnya menutup wawancara.

Keluarga itu sumber kekuatan yang menyeimbangkan pengabdian sebagai ASN dan kehidupan pribadi.

berkarier sebagai pembimbing konseling di sebuah lembaga bimbingan belajar di Bogor selama kurang lebih satu tahun. Setelah itu, ia juga pernah mengemban tugas sebagai guru honorer Bimbingan Konseling (BK) di beberapa SMP dan SMA di Bekasi. Setelah sekitar delapan bulan bekerja di SMP dan SMA terakhir. Sang ayah mendorongnya untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat itu tengah dibuka.

Pada awalnya, Ikcha mengaku sudah merasa cukup nyaman dengan pekerjaannya sebagai guru honorer. Lokasi tempat kerja yang dekat dengan rumah membuatnya lebih leluasa mengatur waktu, terutama sembari merawat kedua anaknya yang masih kecil. Meski demikian, atas dorongan dan pertimbangan dari sang ayah, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti seleksi CPNS di Lemhannas RI tahun 2014 dan kemudian dinyatakan lulus seleksi di tahun 2015.

Ia mengaku bahwa kelulusannya sebagai ASN saat itu benar-benar di luar perkiraannya, terlebih karena proses seleksi sudah menggunakan sistem CAT untuk pertama kalinya. Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya dirinya belum pernah mengikuti tes CPNS. "Eh tapi waktu itu aku

berada pada lini pelayanan publik secara langsung. Bagi dirinya, peran di setiap fase perjalanan karirnya memberi ruang untuk terus berkontribusi serta membawa tantangan tersendiri.

Di tengah proses inpassing menjadi Analis Kebijakan Muda, Ikcha memutuskan untuk mencoba melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2. "Waktu itu kan perpindahan yang harus fungsional itu, inpassing, yaudahlah aku pasrah kan, nah setelah di inpassing, belum ada kelanjutan dari lembaga yang inpassing itu bagaimana, nah aku mutusin apply beasiswa," jelasnya.

Di tahun 2021, Ikcha mencoba seleksi beasiswa LPDP dan diterima menjadi salah satu penerima beasiswa S2. Setelah dinyatakan lulus seleksi beasiswa itulah dirinya kemudian mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di Universitas Indonesia jurusan Psikologi Sosial dan dinyatakan diterima di tahun 2022.

Ikcha menuturkan bahwa selama menempuh perkuliahan di Universitas Indonesia, dia mengaku mendapatkan kesulitan dengan rutinitas perkuliahan. Ikcha yang saat itu diberikan cuti tugas belajar awalnya berniat membagi waktu kuliahnya dengan berperan penuh sebagai

Teknologi Harus Memanusiakan, Bukan Mengorbankan Masa Kecil Anak

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) pada 6 Maret 2026. Permen ini menetapkan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak lagi bisa memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi.

Keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak-anak semakin nyata: pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga adiksi digital.

"Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma," ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, di Jakarta Pusat, Jumat (06/03/2026), dilansir dari komdigi.go.id.

Ia memahami langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Namun, pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika masa depan anak-anak dipertaruhkan. Pemerintah memastikan tanggung jawab perlindungan anak berada pada platform yang mengelola ruang digital, sehingga orang tua tidak harus menghadapi tantangan ini sendirian.

"Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar

16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak," tegas Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

PP TUNAS ini berlaku efektif pada 28 Maret 2026, satu tahun sejak ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025. Implementasinya dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Meutya menilai langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mengambil sikap tegas dalam perlindungan anak di era digital. Gerakan nasional ini melibatkan peran aktif kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi PP TUNAS. Ia akan memastikan program perlindungan anak dari dampak negatif ruang digital masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Dengan 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, pelibatan pemerintah daerah menjadi keharusan. Program ini perlu masuk dalam perencanaan daerah, baik

RPJMD, rencana strategis, maupun APBD," ujar Tito.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan sekolah mulai menerapkan pendekatan pembatasan penggunaan gawai melalui konsep 3S. "Kami menerapkan prinsip screen time untuk membatasi penggunaan gawai, screen break untuk membiasakan anak beristirahat dari layar, dan screen zone untuk mengatur area di sekolah yang boleh atau tidak boleh menggunakan gawai," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi menilai pembatasan penggunaan gawai perlu diimbangi dengan kegiatan alternatif bagi anak. "Anak-anak tidak bisa hanya dilarang menggunakan gadget. Mereka perlu diberikan alternatif aktivitas, termasuk permainan tradisional yang membangun karakter seperti kerja sama dan kejujuran," ujarnya.

Melalui koordinasi lintas kementerian ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan PP TUNAS berjalan efektif sebagai fondasi ekosistem digital yang lebih aman bagi anak Indonesia.

"Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita." - Menkomdigi Meutya

Sumber: komdigi.co.id



Foto. DRA/Komdigi

● HOT NEWS

Indonesia ambil bagian dalam ajang International Biomass Expo 2026 yang berlangsung di Tokyo Big Sight pada 17–19 Maret 2026. Pameran ini menjadi sarana promosi sekaligus penguatan jejaring di sektor bahan bakar biomassa serta teknologi energi panas, guna mendukung target Carbon Neutral 2050.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesian Palm Kernel Shell Producers Association (APCASI) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Indonesian Trade Promotion Center Osaka, serta KBRI Tokyo menghadirkan Paviliun Biomassa Indonesia. Paviliun tersebut menampilkan berbagai perusahaan eksportir cangkang sawit dan pelet tandan kosong anggota APCASI, serta partisipasi mandiri dari PT Sinergi Kharisma Yudha.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Kartini Sjahrir, bersama Atase Perdagangan Merry Astrid Indriasari, Atase Keuangan Leni Nurlaeni, dan Atase Kehutanan Ima Rayaningtyas, turut meresmikan paviliun tersebut. Hadir pula Lupi Hartono, Presiden Direktur PT Sucofindo Sandry Pambuana, Sekretaris Biomass Power Association Japan Hiroaki Taniguchi, serta Ketua APCASI Dikki Akhmar.

“Keberadaan Paviliun Biomassa Indonesia di International Biomass Expo 2026 mencerminkan komitmen untuk memajukan transisi global menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra yang andal dan jangka panjang bagi Jepang dalam mendukung transisi energinya, khususnya di sektor biomassa,” ujar Dubes Kartini Sjahrir dikutip dari kemlu.go.id pada 26 Maret 2026. Beliau menambahkan bahwa KBRI Tokyo terus berupaya memperkuat kemitraan bisnis antara pemangku kepentingan kedua negara serta mempromosikan Indonesia dalam rantai pasokan biomassa global.

Pada rangkaian kegiatan yang sama, Dubes Kartini Sjahrir juga menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian cangkang sawit antara PT Tricitra Agro Perdana dan Pulp & Paper Corp Japan dengan nilai mencapai USD 11 juta atau setara 50 ribu metrik ton. Kinerja ekspor biomassa Indonesia ke Jepang saat ini menunjukkan tren meningkat, dengan kenaikan nilai sebesar 17 persen dan volume 23 persen. Hal ini mencerminkan kepercayaan pasar Jepang yang semakin tinggi terhadap produk Indonesia, seperti pelet kayu, cangkang inti sawit, dan tandan kosong kelapa sawit.

“KBRI Tokyo senantiasa berkomitmen memperkuat kemitraan bisnis antara pemangku kepentingan Indonesia dan Jepang. Termasuk memperluas peluang pasar di sektor energi terbarukan. Kami juga terus berupaya untuk mempromosikan Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam rantai pasokan biomassa global. Terima kasih kepada seluruh mitra dan perusahaan yang berpartisipasi untuk terselenggaranya Paviliun Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, diselenggarakan pula forum bisnis bertajuk “Know More about Amazing Palm Biomass of Indonesia” yang menghadirkan pembicara dari APCASI, PT Sucofindo, dan BPA Japan. Forum ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi unggulan cangkang sawit serta inovasi pemanfaatan tandan kosong dan limbah batang sawit menjadi produk bernilai tambah dengan pendekatan berkelanjutan.

Wakil Duta Besar RI untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, menegaskan bahwa penyelenggaraan forum bisnis ini dimaksudkan untuk mempererat kerja sama antar pelaku usaha sekaligus memperkuat citra dan reputasi produk turunan sawit Indonesia di pasar Jepang.

Sumber: Berbagai Sumber

Indonesia Perkuat Kerja Sama Biomassa dengan Jepang di International Biomass Expo 2026 Tokyo



Sumber: Reuters.com

Keajaiban Papua:

Satwa Purba yang Lama Hilang Akhirnya Ditemukan

Hutan hujan tropis di Semenanjung Vogelkop (Kepala Burung), Papua Barat Daya, baru saja mengungkap rahasia besar yang tersimpan selama ribuan tahun. Sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal *Records of the Australian Museum* berjudul *Found alive after 6,000 years: modern records of an 'extinct' Papuan marsupial, Dactylonax kambuayai* (Marsupialia: Petauridae) mengonfirmasi keberadaan dua spesies marsupial yang sebelumnya hanya dianggap sebagai catatan fosil.

Temuan ini dikategorikan sebagai Lazarus taxon—spesies yang muncul kembali dalam keadaan hidup setelah sebelumnya hanya dikenal dari sisa-sisa material purba. Kedua hewan ini merupakan penyintas dari masa transisi pasca Zaman Es yang sempat diyakini telah punah dari muka bumi sekitar 6.000 hingga 7.500 tahun yang lalu.

Spesies pertama adalah kusu kerdil jari panjang atau pygmy long-fingered possum (*Dactylonax kambuayai*). Hewan mungil ini memiliki ukuran tubuh sekitar 17,6 sentimeter dengan ekor sepanjang 18 sentimeter. Secara visual, kepalanya memiliki corak garis hitam dan putih yang tegas, mirip dengan sugar glider (possum).

Keunikan utamanya terletak pada anatomi tangan. Jari keempat pada mamalia ini memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan dengan jari lainnya. Jari ini berfungsi secara mekanis untuk merogoh dan mengekstraksi larva kumbang penggerek kayu dari dalam batang pohon.

Penemuan taksonomi yang lebih besar yaitu identifikasi kusu layang ekor cincin (*Tous ayamaruensis*). Spesies ini tidak hanya mewakili penemuan kembali satwa yang hilang, tetapi juga penetapan genus baru yang diberi nama *Tous*. Dalam klasifikasi biologi, penemuan genus baru pada kelas mamalia di abad ke-21 adalah peristiwa yang sangat luar biasa.

Tous memiliki ciri fisik mata yang menonjol, menyerupai lemur suportif dari Madagaskar. Sebagai hewan nokturnal, ia sangat lincah

melompat di antara tajuk pohon dan menggunakan cakarnya untuk menyayat kulit pohon guna mengambil getah yang telah mengental.

Catatan Barat sebelumnya hanya mengenal hewan ini dari fragmen rahang berusia 6.000 tahun yang ditemukan di Gua Kria pada tahun 1999. Para ilmuwan menduga hewan ini berevolusi jutaan tahun lalu saat pegunungan di tengah Papua mulai terangkat akibat tumbukan lempeng tektonik Australia dan Pasifik.

Keberhasilan ekspedisi yang melibatkan Universitas Papua (UNIPA) dan peneliti internasional ini berakar kuat pada kolaborasi dengan masyarakat adat Klan Tambrau dan Maybrat. Warga lokal sebenarnya telah mengenal satwa ini secara turun-temurun dengan nama *Tous wan* atau *Tous wansai*. Bagi masyarakat lokal, satwa ini memiliki kedudukan sakral dalam kosmologi mereka. Wilayah hutan tempat *Tous* tinggal dianggap sebagai pusat alam semesta atau tempat asal mula segala makhluk hidup. Di beberapa area,

saking sakralnya, masyarakat dilarang berburu, bahkan pantang untuk sekadar menyebutkan namanya.

Meskipun penemuan ini membawa kegembiraan, status konservasi kedua satwa ini masih menyisakan kekhawatiran besar. Tim Flannery, peneliti utama dari Museum Australia yang telah mempelajari marsupial Papua selama puluhan tahun, menekankan pentingnya perlindungan kawasan.

Kedua spesies ini adalah penghuni hutan primer yang sangat bergantung pada pohon-pohon tua bertajuk tinggi untuk tempat bersarang. Namun, fragmentasi hutan akibat industri ekstraktif dan ekspansi lahan perkebunan dapat memutus jalur jelajah mereka. Selain itu, ancaman perdagangan satwa liar ilegal juga membuat para ilmuwan memutuskan untuk merahasiakan lokasi koordinat pasti penemuan ini. Mengingat tingkat reproduksi marsupial kecil ini yang cenderung rendah, hilangnya beberapa individu dari alam dapat

berdampak fatal bagi populasi mereka.
Sumber: Mongabay.co.id



Foto. Momha

Bukan Sekadar Legenda,

Burung Beracun Papua Terungkap



Foto. goodnewsfromindonesia.id

Papua memang tak pernah berhenti menyingkap keajaiban alamnya. Selain Cendrawasih yang dikenal sebagai burung surga, pulau ini juga menjadi rumah bagi spesies unik yang mengguncang dunia sains: Hooded Pitohui (Pitohui dichrous). Burung penyanyi ini tercatat sebagai burung pertama di dunia yang terbukti memiliki racun dalam

tubuhnya. Fakta tersebut mematahkan anggapan lama bahwa sifat beracun hanya dimiliki reptil, amfibi, atau serangga.

Selama berabad-abad, hutan hujan Papua menyimpan rahasia evolusi yang luput dari perhatian peneliti Barat. Dunia luar menganggap burung hanya mengandalkan kecepatan terbang atau suara merdu untuk bertahan hidup. Namun, alam Papua justru menghadirkan strategi pertahanan yang jauh lebih ekstrem: racun memetakan yang tersimpan di bulu dan kulit.

Keunikan Hooded Pitohui baru terungkap pada 1989. Jack Dumbacher, peneliti dari Universitas Chicago, terkena goresan burung ini saat penelitian di New Guinea. Tanpa sengaja ia menjilat jarinya yang terluka dan merasakan sensasi terbakar, kesemutan, serta mati rasa. Pengalaman itu mendorong penelitian lebih lanjut. Penduduk lokal sebenarnya sudah lama mengenal burung berwarna oranye-hitam ini dan menyebutnya "burung sampah" karena dianggap berbahaya bila dikonsumsi.

Analisis laboratorium kemudian menemukan bahwa burung ini mengandung batrachotoxin, racun yang sama dengan milik katak panah beracun dari Amerika Latin. Konsentrasi tertinggi terdapat pada bulu dan kulit. Racun ini bekerja dengan mengganggu kanal natrium pada sel saraf dan otot, menyebabkan kelumpuhan hingga gagal jantung pada predator kecil. Bagi manusia, kontak biasanya hanya menimbulkan iritasi atau mati rasa sementara.

Menariknya, Hooded Pitohui tidak memproduksi racun sendiri. Mereka mendapatkannya dari makanan, terutama kumbang Melyridae yang kaya akan batrachotoxin. Tubuh burung ini telah berevolusi untuk menoleransi zat berbahaya tersebut, sekaligus menyimpannya sebagai senjata pertahanan. Adaptasi ini menunjukkan betapa kompleksnya mekanisme evolusi di hutan tropis Papua.

Meski penelitian awal dilakukan di Papua Nugini, Hooded Pitohui juga hidup di wilayah Indonesia. Mereka tersebar di hutan hujan Papua, dari Papua Barat hingga Papua Pegunungan, bahkan di Pulau Yapen. Keberadaan mereka memperkaya daftar fauna endemik Indonesia yang bernilai ilmiah tinggi.

Penemuan ini membuka mata dunia bahwa Hooded Pitohui bukan satu-satunya burung beracun. Di Papua juga ditemukan Ifrita kowaldi dengan racun serupa. Di belahan dunia lain, ada angsa bersayap taji Afrika dan puyuh migrasi Eropa yang sesekali beracun karena pola makan tertentu. Namun, Pitohui tetap menjadi ikon karena dialah yang pertama membuktikan bahwa burung bisa memiliki pertahanan kimiawi.

Kehadiran burung ini menegaskan bahwa Papua adalah gudang keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Penemuan Hooded Pitohui menjadi pengingat penting bahwa menjaga hutan Papua berarti melindungi warisan sains yang tak ternilai. Kerusakan habitat bukan hanya mengancam kelestarian spesies, tetapi juga memutus rantai makanan yang menjadi sumber pertahanan alami mereka. Konservasi Papua, dengan segala misteri biologisnya, adalah investasi bagi ilmu pengetahuan dan generasi mendatang.

Sumber: goodnewsfromindonesia.id

Kemas Ilham Akbar: Dari Dunia Politik ke Ruang Strategis di Lemhannas RI

Program Pendidikan Penyiapan dan Pematangan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Lemhannas RI kembali menghadirkan peserta dari beragam latar belakang profesi dan institusi. Salah satunya adalah Kemas Ilham Akbar, Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar. Kehadirannya merepresentasikan unsur politik dalam ruang pembelajaran strategis yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional.

Sejak awal mengikuti pendidikan, Kemal merasakan kesan kuat terhadap tata kelola program. "Saya sangat

terkesan dengan bagaimana segala sesuatu diatur secara baik, lengkap dan sistematis," ujarnya. Ia menilai kesiapan fasilitas tempat tinggal, sarana pendidikan, dan perencanaan pembelajaran menunjukkan manajemen yang terukur dan matang. Kesan awal ini menjadi fondasi positif dalam mengikuti seluruh rangkaian pendidikan.

Meski demikian, proses adaptasi tetap menjadi tantangan tersendiri. Ia mengakui harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kental dengan budaya belajar militer. Perbedaan kultur tersebut menuntut kedisiplinan dan pola pikir yang sistematis. Adaptasi ini justru memperluas perspektifnya mengenai kepemimpinan yang tegas, terstruktur, dan berbasis tata kelola.

Dari sisi substansi, ia menilai materi dan metode pembelajaran sangat relevan dengan dinamika kepemimpinan nasional saat ini. "Banyak dalam kesempatan diskusi dan ceramah menggunakan contoh atau studi kasus yang terupdate," jelasnya. Pendekatan ini membantu peserta menghubungkan teori dengan realitas kebijakan yang sedang berlangsung, sehingga analisis tidak berhenti pada tataran konseptual.

Relevansi tersebut juga tercermin dalam Taskap yang tengah ia susun berjudul "Transformasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD Guna Meningkatkan Kualitas Konsolidasi Demokrasi dalam Rangka Ketahanan Nasional". Ia menjelaskan bahwa kajian tersebut berangkat dari evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung dan pertanyaan mendasar tentang efektivitasnya. "Saya menulis mengenai bagaimana kondisi konsolidasi demokrasi

kita saat ini terutama terkait sistem pilkada secara langsung, dan apakah sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan," ungkapnya. Melalui kajian ini, ia berupaya melihat kemungkinan format alternatif yang dinilai lebih efektif dalam memperkuat kualitas demokrasi sekaligus ketahanan nasional.

Efektivitas pembelajaran semakin terasa melalui kombinasi metode yang digunakan. Kuliah umum memberikan landasan konseptual, sementara diskusi kelompok dan studi kasus mendorong peserta menguji argumentasi secara terbuka. Ia menilai metode ini "sangat efektif, karena peserta tidak hanya belajar secara teoritis tetapi juga diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi tersebut dalam kelompok diskusi". Proses ini membantu mengasah kemampuan analisis dan meningkatkan kapasitas kepemimpinan secara praktis.

Berasal dari unsur non-ASN, ia merasakan seluruh materi sebagai pengalaman baru yang memperkaya wawasan. "Semua materi sangat berkesan, memberikan wawasan baru dan juga pengalaman baru," tuturnya. Ia juga menilai kualitas narasumber sangat baik karena tidak hanya memiliki kedalaman keilmuan, tetapi mampu menghadirkan contoh kasus aktual dengan bahasa yang mudah dipahami.

Interaksi antar peserta berlangsung dinamis karena perbedaan latar belakang profesi dan pendidikan. Menurutnya, dinamika ini menjadi pengalaman yang menarik sekaligus memperluas sudut pandang. Interaksi tersebut tidak hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan jejaring kepemimpinan nasional yang saling melengkapi.

Dalam pandangannya, P4N memiliki peran strategis dalam membentuk pemimpin berwawasan kebangsaan dan geopolitik. Program ini memperkuat kapasitas pimpinan dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, membekali peserta dengan analisis geopolitik dan geostrategis, serta memperkenalkan pendekatan Astagatra dalam memahami ketahanan nasional. Kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri dan Luar Negeri serta penyusunan Taskap menjadi instrumen konkret untuk menguji kemampuan analitis peserta dalam konteks nyata.



Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M.:

Sinergi Metode Pembelajaran P4N Mengasah Ketajaman Analisis Peserta

Bagi Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M., peserta Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXIX Lemhannas RI yang menjabat sebagai Kepala Bidang Diseminasi Aspirasi Masyarakat dan Daerah pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran, pengalaman mengikuti pendidikan ini menjadi momentum penting untuk menguatkan kapasitas analisis strategisnya.

Memasuki lingkungan pendidikan Lemhannas RI menghadirkan pengalaman intelektual yang berbeda dari rutinitas kerja sehari-hari. Ia mengakui bahwa sejak awal mengikuti program ini, terdapat dorongan kuat untuk mengubah cara berpikir yang sebelumnya cenderung sektoral menjadi lebih integral dan komprehensif.

Transformasi cara pandang tersebut tidak terjadi secara instan. Bagi Syulfah, tantangan utama justru terletak pada upaya mengangkat berbagai persoalan daerah yang selama ini dihadapinya menjadi bagian dari formulasi kebijakan strategis pada tingkat nasional..

Kesadaran inilah yang kemudian mendorong Syulfah mengangkat isu tersebut dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang sedang ia susun. Taskap tersebut berjudul Penguatan Fungsi Legislasi DPD RI Guna Menjadikan Aspirasi Daerah Sebagai Prioritas Utama Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional.

Menurutnya, kajian tersebut berangkat dari adanya kesenjangan antara idealitas konstitusi dengan praktik politik yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam struktur parlemen Indonesia, kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah dinilai masih terbatas.

"DPD RI masih terjebak dalam desain bikameral lunak atau bahkan bikameral semu. Keterbatasan wewenang legislasi ini memicu sumbatan aspirasi daerah yang menghambat optimalisasi otonomi daerah," ujarnya.

Selain memperdalam substansi kajian strategis, bagi Syulfah proses pendidikan

di P4N juga memberikan pengalaman pembelajaran yang memperkaya kapasitas analisis peserta. Berbagai metode pembelajaran diterapkan secara terpadu untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dan strategis.

"Sinergi metode pembelajaran tersebut terbukti sangat efektif secara andragogi. Kuliah umum mengonstruksi fundamen teoretis yang kuat, sementara diskusi kelompok dan studi kasus menguji ketajaman analisis kami terhadap fenomena empiris," tuturnya.

Selain proses pembelajaran di kelas, interaksi dengan peserta lain dari berbagai latar belakang profesi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan perspektif kepemimpinan. Diskusi yang berlangsung kerap menghadirkan sudut pandang yang beragam sehingga memperkaya analisis terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

Interaksi tersebut tidak hanya memperkuat proses pembelajaran, tetapi juga membangun jejaring kepemimpinan nasional yang berbasis pada kolaborasi lintas institusi. Dalam tata kelola pemerintahan modern, sinergi semacam ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk menghadapi kompleksitas tantangan nasional.

Lebih jauh, Syulfah menilai bahwa P4N memiliki peran penting dalam membentuk pemimpin yang mampu membaca dinamika masa depan. Program ini mendorong peserta mengembangkan kemampuan strategic foresight, yaitu kemampuan memproyeksikan perubahan serta merumuskan kebijakan yang antisipatif.

"Program ini menstimulasi terbentuknya strategic foresight sehingga lulusannya memiliki

kapabilitas untuk merumuskan kebijakan yang antisipatif dan adaptif di tengah disrupsi global," ujarnya.

Secara keseluruhan, Syulfah memandang penyelenggaraan P4N sebagai salah satu kekuatan institusional Lemhannas RI dalam menyiapkan calon pemimpin nasional. Kurikulum dan ekosistem pembelajaran dirancang secara sistematis untuk memperkuat wawasan kebangsaan sekaligus ketajaman analisis strategis para pesertanya.





- 1 Jam Pimpinan Lemhannas RI Awal Kinerja Anggaran Tahun 2026 pada Selasa (6/1) di Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI
- 2 Rapat Pimpinan Tindak Lanjut Program RKA-K/L Lemhannas RI Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (21/1).
- 3 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kerja sama terkait penyelenggaraan pendidikan pimpinan tingkat nasional, peningkatan kualitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan kajian-kajian strategis pengukuran ketahanan nasional di DKI Jakarta pada Rabu (28/1).





4 Penghormatan terakhir kepada Gubernur ke-16 Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono yang telah berpulang pada Senin (9/1).

5 Rapat Penyusunan Rekomendasi Urgen dan Cepat Direktorat Pengkajian Strategik Ideologi dan Politik Deputy Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI pada Kamis (26/2).

6 Pemberian Tanda Alumni Kehormatan Lemhannas RI kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. dan Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. pada Rabu (18/2).



6

7 Ceramah kebijakan publik oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. kepada peserta P3N Angkatan XXVI pada Rabu (4/3)

8 Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada (9–11/3)

9 Upacara Penyerahan Jabatan Wakil Gubernur Lemhannas RI periode 2025-2026, Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. pada Kamis (12/3)



SELAMAT HARI RAYA

NYEPI

TAHUN BARU SAKA 1948





SELAMAT HARI RAYA

Idulfitri

1 SYAWAL 1447 H

